



**DETERMINAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2013-2018**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

**Rohmatullah
NIM 7111416076**

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

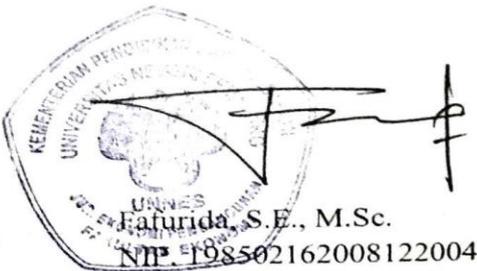
Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi fakultas Ekonomi Negeri Semarang.

Disetujui Pada;

Hari : Senin

Tanggal : 24 Februari 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan,



Fafurida, S.E., M.Sc.
NIP. 198502162008122004

Pembimbing,



Yozi Aulia Rahman S.E., M.Sc
NIP. 198701222014041001

PENGESAHAN
KELULUSAN

Skripsi dengan judul Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Papua Tahun 2013-2018 yang disusun oleh Rohmatullah, telah diuji di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Maret 2020

Penguji I



Karsinah, S.E, M.Si.
NIP.197010142009122001

Penguji II



Diky Aji Suseno, S.E, M.Si.
NIP.197612032003121004

Penguji III



Yozi Aulia Rahman, S.E, M.Sc.
NIP.198701222014041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D.
NIP.196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohmatullah

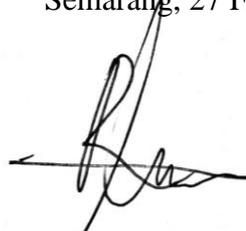
NIM : 7111416076

Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 04 November 1996

Alamat : Manggar Wetan Rt 04 Rw 02, Kecamatan
Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Meyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar – benar hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan dari hasil karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Semarang, 27 Februari 2020



Rohmatullah

NIM 7111416076

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- “Selalu ada harapan bagi orang yang berdo’a dan selalu ada jalan bagi orang yang berusaha”
- “Menunda pekerjaan sama seperti menabung penderitaan”
- “Man Jadda Wajada wa Man Saaro’ Alard – darbi Washola wa Man Shabara zafira” (Al Hadist)

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada;

- Ibu Suparti dan Bapak Masluri selaku kedua orangtua saya yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayang dan cinta serta doanya kepada saya.
- Kakak-kakak dan Adik-adikku tersayang yang selalu mendukung setiap langkah saya dan seluruh keluarga besar saya.
- Bapak dan Ibu dosen saya, yang senantiasa sabar dalam memberikan ilmu dan bimbinganya.
- Almamater saya Universitas Negeri Semarang terkhusus Jurusan Ekonomi Pembangunan.
- Sahabat dan seluruh teman – teman saya.

KATA PENGANTAR

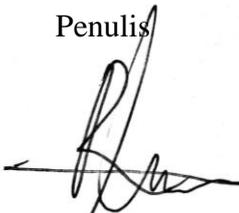
Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah yang maha kuasa yang telah melimpahkan rahmat serta anugerah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya yang berjudul “Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2018”

Penulisan skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini karena adanya bimbingan, bantuan, saran dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto MBA, P.hD., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin mengikuti program SI di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
3. Fafurida, S.E., M.Sc., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana selama masa studi di Jurusan Ekonomi Pembangunan.
4. Yozi Aulia Rahman S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan, sumbangan pemikiran dan motivasi selama masa kepenulisan skripsi ini.
5. Karsinah, S.E, M.Si. sebagai Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik, saran, dan penilaian untuk perbaikan skripsi ini.
6. Deky Aji Suseno, S.E, M.Si. sebagai Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik, saran, dan penilaian untuk perbaikan skripsi ini.
7. Dyah Maya Nihayah S.E, M. Si., selaku Dosen Wali rombel EP A 2016 yang selalu membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan ini hingga selesai.

8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahunnya.
9. Kedua orang tua saya tercinta serta semua kakak saya yang senantiasa di rahmati Allah SWT telah memberikan doa, semangat, hiburan, dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan disaat mengikuti perkuliahan.
10. Ali Alvian, Selaku atasan serta kakak didalam dunia pekerjaan saya yang selalu memberikan arahan, dukungan, serta nasehat.
11. Riza, Okky, Fani, Diana, Candra, Aan, dan Devis yang telah memberikan semangat, bantuan, dan hiburan selama penulisan Skripsi ini.
12. Teman – teman rombel EP A 2016 terimakasih atas pengalaman dan persahabatan yang tidak akan terlupakan.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung dan tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis, pemerintah, masyarakat, maupun pembaca.

Penulis

Rohmatullah

SARI

Rohmatullah. 2020. “*Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Papua tahun 2013-2018*”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.

Kata Kunci : Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi , Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Kabupaten/ Kota.

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka indeks gini tertinggi di Indonesia dan diatas rata-rata nasional, sementara nilai indeks entropi theil Provinsi Papua selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, artinya ketimpangan pendapatan di Provinsi Papua lebih parah dari Indonesia. Hal tersebut merupakan masalah serius karena akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data panel yaitu kombinasi *time series* dan *cross section* yang diuji dengan metode analisis regresi *Fixed Effect* dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Pengujian secara parsial digunakan uji t-Statistik dan pengujian secara serempak digunakan uji F-statistik, dimana pengujian tersebut menggunakan alat bantu program Eviews 9.0. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2013-2018. Variabel penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dana alokasi umum dan belanja modal kabupaten/ kota.

Hasil dari penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Entropi Theil, variabel tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks entropi theil, variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Entropi Theil, variabel dana alokasi umum kabupaten/kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Entropi Theil, dan variabel belanja modal berpengaruh negative dan signifikan terhadap indeks entropi theil. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap Indeks Entropi Theil di Provinsi Papua. Koefisien determinasi R^2 sebesar 0.8982 menunjukkan bahwa variabel independen yang diteliti mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 89,82% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 10,18% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada penelitian.

Saran dari hasil penelitian ini adalah (1) Pemerintah dapat lebih meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, secara komprehensif atau luas dan lengkap. (2) Mengembangkan sektor pertanian yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan,. (3) Meningkatkan mutu pendidikan di semua Kabupaten/kota seperti sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. (4) Pemanfaatkan dana alokasi umum secara maksimal dan tepat sasaran. (5) Pengalokasian belanja modal lebih merata diseluruh daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

ABSTRACT

Rohmatullah. 2020. "*The Determinants of Income Distribution in Papua Province in 2013-2018*". Thesis. Department of Development Economics, Faculty of Economics. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Advisor by Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.

Keywords: Inequality of Income Distribution, Economic Growth, Poverty Rate, Human Development Index, General Allocation Funds and Regency / City Capital Expenditures.

Papua Province is one of the provinces that has the highest Gini index in Indonesia and is above the national average, while the value of theil entropy index in Papua Province always increases every year, meaning that income inequality in Papua Province is worse than Indonesia. This is a serious problem because it will have an impact on people's welfare. Therefore this study aims to analyze the factors that influence the income distribution inequality in Papua Province.

The research method used is a quantitative method with panel data that is a combination of time series and cross sections tested with the Fixed Effect regression analysis method using the Ordinary Least Square (OLS) method. Partial testing used the t-Statistic test and simultaneous testing used the F-statistical test, where the test used the Eviews 9.0 program tool. In this study using secondary data obtained from the website of the Central Statistics Agency of Papua Province and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) in 2013-2018. The variables of this research are income inequality, economic growth, poverty level, human development index, general allocation fund and district / city capital expenditure.

The results of this study are the variable of economic growth has a negative and significant effect on theil entropy index, the poverty rate variable has a positive and significant effect on theil entropy index, the human development index variable has a negative and not significant effect on theil entropy index, the variable of general district fund allocation negative and significant effect on theil entropy index, and capital expenditure variables have a negative and significant effect on theil entropy index. Simultaneously, all independent variables affect the theil entropy index in Papua Province. The coefficient of determination R² of 0.8982 indicates that the independent variable studied was able to explain its effect of 89.82% on the dependent variable, while the remaining 10.18% was explained by other variables not included in the study.

Suggestions from the results of this study are: (1) The government can further increase infrastructure development costs, comprehensively or broadly and completely. (2) Developing the agricultural sector that can support economic growth in rural areas . (3) Improving the quality of education in all districts / cities such as facilities and infrastructure that are still lacking. (4) Utilizing public allocation funds to the maximum and right on target. (5) Allocation of capital expenditure is more evenly distributed throughout the region in the implementation of development.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	24
1.3 Cakupan Masalah	25
1.4 Rumusan Masalah	26
1.5 Tujuan Penelitian	27
1.6 Manfaat Penelitian	27
1.7 Orisinalitas Penelitian	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN.....	30
2.1 Kajian Teori Utama	30
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi.....	30

2.1.1.1	Pembangunan Ekonomi Daerah	31
2.1.2	Distribusi Pendapatan	32
2.1.2.1	Teori Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	33
2.1.2.2	Pengukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan	35
2.1.3	Pertumbuhan Ekonomi.....	41
2.1.3.1	Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	41
2.1.3.2	Teori Rostow dan Musgrave.....	44
2.1.3.3	Teori Harrod-Domar.....	44
2.1.4	Kemiskinan	46
2.1.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	47
2.1.6	Dana Alokasi Umum (DAU)	50
2.1.7	Belanja Modal	50
2.2	Kajian Variabel	52
2.2.1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	52
2.2.2	Pengaruh Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan ...	53
2.2.3	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	54
2.2.4	Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	55
2.2.4	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	56
2.3	Penelitian Terdahulu	58
2.3.1	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu	64
2.4	Kerangka berfikir	69
2.5	Hipotesis Penelitian.....	72
BAB III METODE PENELITIAN		73

3.1	Jenis dan Desain Penelitian	73
3.2	Jenis dan Sumber Data	73
3.3	Metode Pengumpulan Data	74
3.4	Variabel Penelitian	75
3.4.1	Definisi Variabel Penelitian	75
3.4.2	Definisi Operasional Variabel.....	76
3.5	Metode Analisis Data.....	78
3.5.1	Model Analisis Regresi Data Panel	78
3.5.2	Model Regresi Data Panel.....	79
3.5.3	Pemilihan Teknik Estimasi Data Panel	80
3.5.4	Uji Spesifikasi Model.....	81
3.5.4.1	Uji Spesifikasi Model dengan Uji Chow	83
3.5.4.2	Uji Spesifikasi Model dengan Uji Hausmann.....	83
3.5.4.3	Uji Lagrangre Multiplier (LM)	84
3.5.5	Uji Asumsi Klasik.....	84
3.5.5.1	Uji Normalitas	84
3.5.5.2	Uji Multikolinieritas	85
3.5.5.3	Uji Heteroskedastisitas.....	85
3.5.5.4	Uji Autokorelasi.....	86
3.5.6	Pengujian Statistik.....	86
3.5.6.1	Koefisien Determinasi R2 (R-Square)	86
3.5.6.2	Uji Signifikansi Individu (Uji t).....	87
3.4.6.3	Uji Secara Bersama-sama (Uji F)	87
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		88
4.1	Deskripsi Data.....	88
4.1.1	Ketimpangan Pendapatan	88

4.1.2	Pertumbuhan Ekonomi	89
4.1.3	Tingkat Kemiskinan	91
4.1.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	92
4.1.5	Dana Alokasi Umum (DAU).....	93
4.1.6	Belanja Modal.....	94
4.2	Hasil Penelitian	95
4.2.1	Analisis Pemilihan Model	95
4.2.2	Analisis Regresi.....	97
4.3	Uji Statistik	100
4.4	Uji Asumsi Klasik.....	103
4.5	Pembahasan.....	105
BAB V PENUTUP		116
5.1	Simpulan	116
5.2	Saran	117
DAFTAR PUSTAKA		119
LAMPIRAN		124

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%) Menurut Pulau Tahun 2013-2018	3
Tabel 1.2 Distribusi PDB Nasional (%) Menurut Pulau Tahun 2013-2018	4
Tabel 1.3 Rincian Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018 (dalam Juta Rupiah)	21
Tabel 1.4 Rincian Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018 (dalam Juta Rupiah).....	23
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	58
Tabel 4.1 Uji chow	96
Tabel 4.2 Uji Hausman	97
Tabel 4.3 Hasil <i>Fixed Effect Model</i>	98
Tabel 4.4 Uji Koefisien Determinasi	100
Tabel 4.5 Uji t-Statistik	101
Tabel 4.6 Uji F-Statistik.....	102
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas	104
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas.....	105
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi	106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Gafik Rata-Rata Gini Rasio Indonesia Tahun 2013-20188
Gambar 1.2	Indeks Gini Provinsi Papua Tahun 2013-2018 10
Gambar 1.3	Indeks Entropi Theil Provinsi Papua Tahun 2013-2018..... 11
Gambar 1.4	Pendapatan Per kapita dan Indeks Entropi Theil Provinsi Papua Tahun 2013-2018..... 12
Gambar 1.5	Grafik Pendapatan Daerah di Provinsi Papua Tahun 2010-2018..... 14
Gambar 1.6	Tingkat pertumbuhan PDRB per kapita menurut kabupaten/ kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018 (dalam persen)..... 16
Gambar 1.7	Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2013-2018 17
Gambar 1.8	Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua tahun 2013-2018 .. 19
Gambar 2.1	Kurva Kuznet “U-Terbalik” 34
Gambar 2.2	Kurva Lorenz..... 35
Gambar 3.1	Bagan pemilihan model data panel 82
Gambar 4.1	Grafik Indeks Entropi Theil semua Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2013-2018..... 89
Gambar 4.2	Pertumbuhan PDRB menurut kabupaten/ kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018 (dalam persen)..... 90
Gambar 4.3	Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2013-2018 92
Gambar 4.4	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018 93
Gambar 4.5	Rincian Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018 (dalam Juta Rupiah) 94
Gambar 4.6	Rincian Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018 (dalam Juta Rupiah)..... 95
Gambar 4.7	Uji Normalitas 103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Indeks Entropi Theil, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, IPM, DAU, BM semua Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2013-2018.....	124
Lampiran 2. Hasil Regresi Uji Chow	129
Lampiran 3. Hasil Regresi Uji Hausman	130
Lampiran 4. Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	131
Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan (*development*) adalah suatu proses perubahan atau transformasi yang meliputi seluruh sistem seperti ekonomi, politik, pertahanan, infrastruktur, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya (Alexander, 1994). Sementara menurut Todaro dan Smith (2006), bahwa pembangunan yaitu suatu proses yang tetap di mana terjadi peningkatan volume produksi suatu perekonomian secara berkelanjutan sehingga pendapatan nasional juga ikut meningkat.

Istilah pembangunan di Indonesia sendiri sudah sejak lama menjadi terminologi sehari-hari. Upaya untuk pemerataan pembangunan dan hasilnya baru nyata tampak sejak pelita III, dimana strategi pembangan diubah dengan menempatkan pembangunan yang dikenal dengan delapan jalur pemerataan yaitu : (1) pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, berupa pangan, sandang dan papan. (2) kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan (3) pemerataan pendapatan (4) kesempatan kerja. (5) kesempatan berusaha (6) kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi milenial. (7) penyebaran pembangunan. (8) kesempatan memperoleh keadilan (Dumairy, 2004).

Selain dikenal dengan pembangunan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita

masyarakat dalam jangka waktu yang panjang (Boediono, 2005). Berbeda dengan pendapat Arsyad (2004), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai naiknya *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa melihat apakah kenaikan itu lebih tinggi atau malah lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, dan apakah malah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak.

Menurut Suryana (2000), pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selalu diartikan sebagai kenaikan pendapatan per kapita, karena pendapatan per kapita merupakan suatu perencanaan dari timbulnya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya pembangunan dan pertumbuhan akan selalu dapat berjalan beriringan karena setiap pembangunan akan selalu ada pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan yang tidak terkendali atau tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah begitu juga akan berpengaruh dipertumbuhan ekonomi, dengan begitu akan berdampak dikemiskinan, tingginya pengangguran, pendapatan rendah, serta banyaknya kriminalitas. Hal ini masih menjadi permasalahan yang ada di setiap provinsi untuk dapat meningkatkan pendapatan di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang yang secara administratif terdiri dari 34 Provinsi. Sementara Indonesia merupakan negara dengan perkembangan ekonomi yang cukup besar. Hal ini ditopang oleh pemaksimalan kekayaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda. Perbedaan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam pembangunan (Sutrisno, 2012). Kekayaan

sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya sosial maupun sumber daya buatan.

Adanya perbedaan pembangunan antar daerah akan menyebabkan perbedaan ekonomi sehingga akan meningkatkan perbedaan pendapatan. Perbedaan pendapatan ekonomi di setiap pulau selalu mengalami perubahan. Hal ini dapat diukur melalui laju pertumbuhan ekonomi menurut pulau di Indonesia yang dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%) Menurut Pulau Tahun 2013-2018

Pulau	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sumatera	4,02	4,66	3,54	4,29	4,3	4,54
Jawa	5,60	5,59	5,45	5,59	5,61	5,72
Bali dan Nusa Tenggara	5,12	5,86	10,29	5,89	3,73	2,68
Kalimantan	2,13	3,19	1,31	2,01	4,33	3,91
Sulawesi	7,88	6,88	8,18	7,41	6,99	6,65
Maluku Dan Papua	4,54	4,32	6,62	7,45	4,89	6,99

Sumber : BPS Indonesia 2018

Berdasarkan data BPS tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi setiap pulau di Indonesia pada tahun 2013 sampai 2018 terus mengalami ketidakstabilan. Beberapa pulau laju pertumbuhan ekonominya kebanyakan mengalami penurunan pada tahun 2018, akan tetapi di beberapa pulau juga ada yang mengalami kenaikan, angka laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kepulauan Maluku dan Papua yaitu sebesar 6,99% pada tahun 2018, dibandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh angka 4,89%, sementara pulau Sulawesi menduduki posisi kedua dengan angka 6,65% pada tahun 2018, angka tersebut lebih kecil dibandingkan dari tahun sebelumnya, dengan kata lain ada penurunan laju pertumbuhan ekonominya. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 paling rendah di tempati oleh pulau Bali dan

Nusa Tenggara serta pulau Kalimantan yang masing masing mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu sebesar 3,43% serta 4,33% pada tahun 2018 menjadi 2,68% serta 3,91% pertumbuhan ekonomi pulau Sumatera dan pulau Jawa juga tumbuh membaik masing masing sebesar 4,54% dan 5,72% di tahun 2018. (BPS. 2018).

Selain perbedaan laju pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, kontribusi PDRB keenam pulau tersebut tentunya juga memiliki peran yang berbeda-beda terhadap kontribusi PDB di Indonesia. Data kontribusi PDRB terhadap PDB menurut pulau di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2 Distribusi PDB Nasional (%) Menurut Pulau Tahun 2013-2018

Pulau	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sumatera	23,83	23,81	21,6	22,03	21,66	21,58
Jawa	57,99	57,78	56,8	58,49	58,4	58,48
Bali dan Nusa Tenggara	2,53	2,54	5,5	3,13	3,54	3,05
Kalimantan	8,67	8,52	6	7,85	8,2	8,2
Sulawesi	4,74	4,9	7,4	6,04	6,1	6,22
Maluku Dan Papua	2,18	2,43	2,7	2,46	2,1	2,47

Sumber : BPS Indonesia 2018

Sementara peran pulau Jawa dalam perekonomian nasional dari tahun 2013 sampai 2018 masih yang terbesar. Ini dikarenakan kontribusinya ke Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 58,48% pada tahun 2018. Dengan kata lain pulau Jawa memiliki kontribusi lebih dari setengah perekonomian Indonesia. Sementara pulau Sumatera 21,58% Kalimantan 8,2% Sulawesi 6,22% Bali dan Nusa Tenggara 3,05% sedangkan pulau Maluku dan Papua menempati urutan paling rendah dalam kontribusi perekonomian nasional yaitu sebesar 2,47% hal ini berbanding terbalik dengan tingkat laju pertumbuhannya yang menempati posisi pertama.

Selain laju pertumbuhan ekonomi daerah, dalam suatu pembangunan ekonomi daerah hal yang perlu diperhatikan adalah masalah ketimpangan distribusi pendapatan, apabila suatu daerah pendapatannya tinggi tetapi hal itu tidak diimbangi dengan pemerataan pendapatan di suatu daerah tersebut maka angka pertumbuhan tersebut menjadi bias. Sementara dari sisi sosial, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak dinikmati oleh seluruh penduduk di setiap daerah sesuai kebutuhan mereka sehingga terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah.

Persentase pertumbuhan ekonomi merefleksikan persentase kenaikan pendapatan perkapita masyarakat. Apabila di suatu daerah tersebut angka pertumbuhan ekonominya tinggi tetapi angka ketimpangannya juga tinggi maka hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar PDRB yang diperoleh suatu daerah tersebut merupakan kontribusi dari sebagian kecil masyarakat. Maka hal tersebut ada hubungannya antara pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan.

Kuznet (1955) menyatakan bahwa mula-mula pertumbuhan ekonomi pada tahap awal akan mengalami kenaikan disertai dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi pula sampai pada titik tertentu, kemudian pada tahap selanjutnya ketimpangan distribusi pendapatan akan mulai mengalami pemerataan. Teori ini kemudian dikenal sebagai Kurva Kuznet “U Terbalik” karena terdapat perubahan dalam distribusi pendapatan selama kurun waktu tertentu (Todaro, 2006).

Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan yang merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Menurut Tambunan (2001), Kesenjangan ekonomi atau

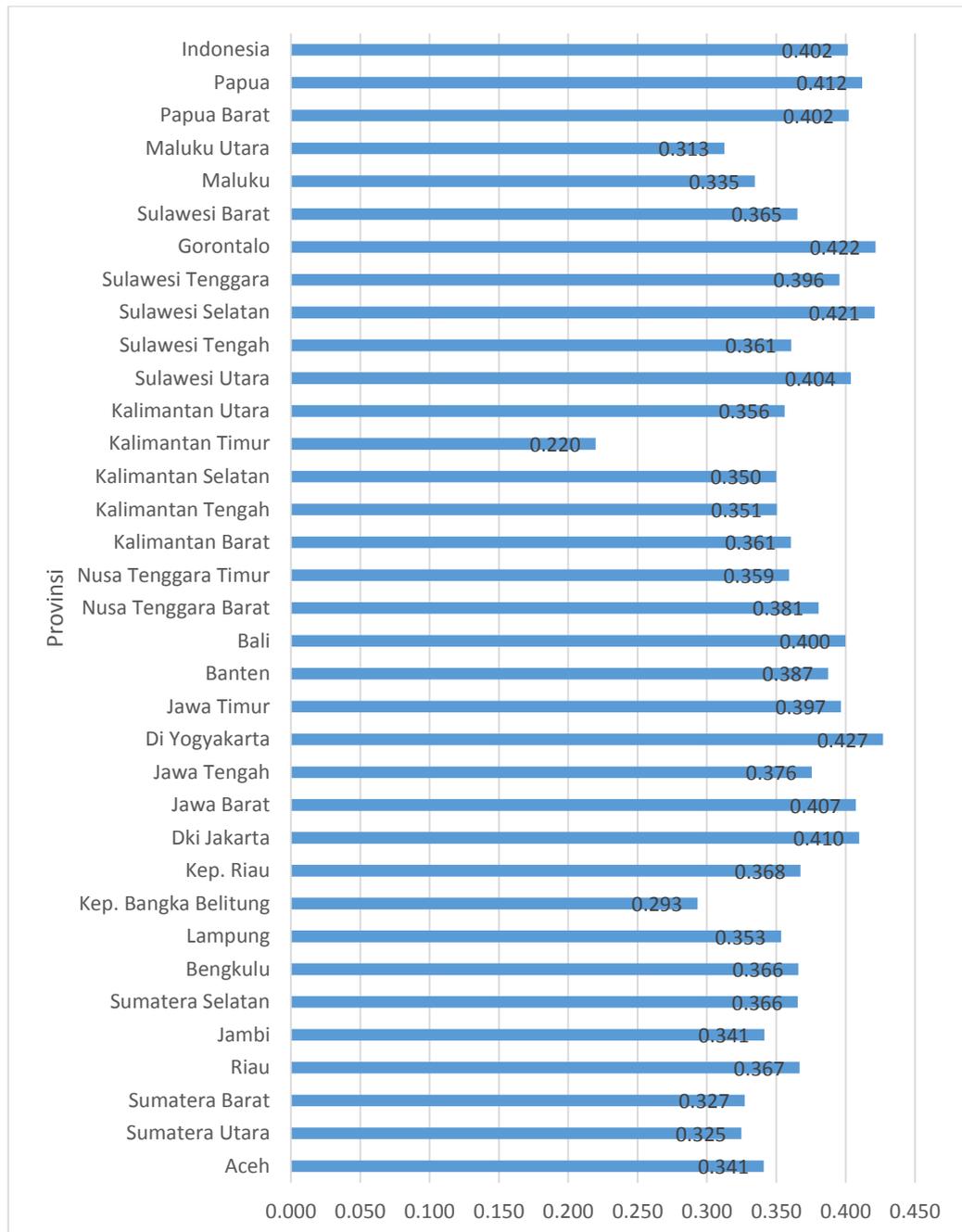
ketimpangan pendapatan adalah adanya perbedaan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Adanya pembangunan yang tidak merata di Indonesia mengakibatkan ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga menimbulkan tingkat kesenjangan masyarakat, sedangkan suatu daerah akan dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi jika tiga masalah telah diselesaikan dalam pembangunan. Ketiga masalah tersebut diantaranya adalah distribusi pendapatan yang semakin memburuk jumlah kemiskinan yang terus meningkat dan lapangan pekerjaan yang tidak variabel sehingga tidak dapat menyerap para pencari pekerjaan.

Faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di Negara Berkembang menurut Arsyad (1999), ada delapan hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan yaitu 1) meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan turunnya pendapatan per kapita, 2) terjadinya inflasi yang tidak diikuti dengan penambahan barang produksi, 3) ketidakmerataan pembangunan antar daerah, 4) investasi pada padat modal lebih banyak dibandingkan investasi padat karya sehingga menyebabkan pengangguran bertambah karena pendapatan yang diperoleh relatif kecil, 5) mobilitas sosial yang rendah, 6) berlakunya kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga barang hasil industri menjadi naik dengan tujuan untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, 7) ketidakelastisan permintaan barang-barang ekspor menyebabkan turunnya nilai

tukar (*term off trade*) bagi negara berkembang, 8) berkurangnya industri-industri rumah tangga yang mengakibatkan pendapatan menjadi berkurang.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan suatu daerah adalah dengan melihat koefisien gini (*gini ratio*). Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Jika indeks Gini bernilai 0 akan dikatakan adanya pemerataan pendapatan sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama di suatu daerah tersebut sedangkan apabila nilainya 1 maka bisa dikatakan ketidakmerataan pendapatan sempurna di suatu daerah tersebut. Dan apabila nilai yang di peroleh dari perhitungan Indeks Gini mencapai 0,4 maka bisa dikatakan ketimpangan wilayah tersebut termasuk parah. Berdasarkan data dari BPS, ketimpangan pendapatan yang diukur melalui gini ratio di Provinsi Indonesia, dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:



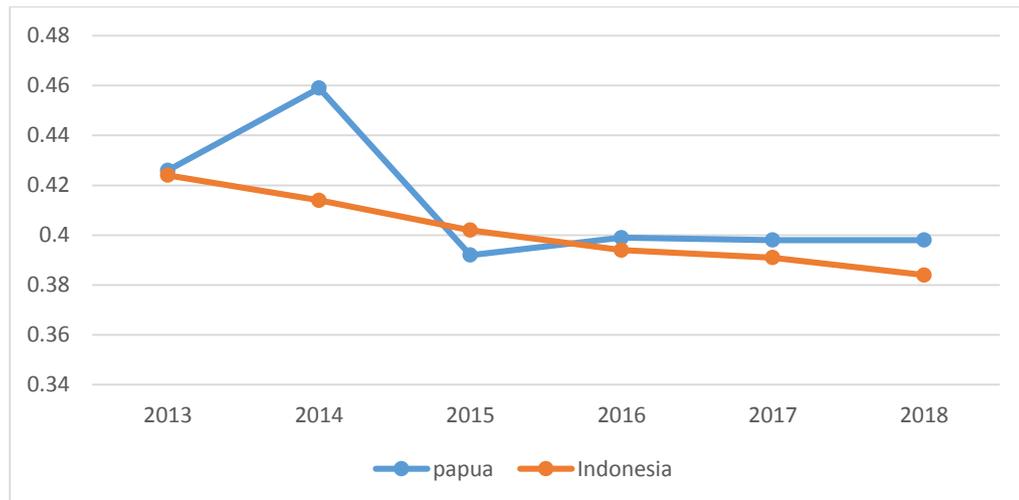
Gambar 1.1 Gafik Rata-Rata Gini Rasio Indonesia Tahun 2013-2018

Sumber: BPS Indonesia 2018

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat besaran nilai ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Indonesia tahun 2013-2018. Daerah yang memiliki nilai indeks gini tinggi mayoritas terletak di bagian tengah dan timur Indonesia. ketimpangan di Indonesia masih termasuk kategori tinggi. Pada tahun 2013-2018

nilai rata-rata Indeks Gini Indonesia mencapai angka 0.402. bahkan di tahun yang sama beberapa provinsi rata-rata ketimpangannya masih diatas dari angka ketimpangan nasional. Diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua Barat serta Papua yang masing masing nilainya sebesar 0.410, 0.407, 0.427, 0.404, 0.421, 0.422, 0.402, 0.412.

Provinsi dengan tingkat disparitas pendapatan tergolong tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara Gorontalo, Papua Barat dan Papua. Hal ini dikarenakan daerah tersebut memiliki nilai koefisien gini lebih dari 0.4. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki rata-rata Indeks Gini terendah pada tahun 2013-2018 yaitu sebesar 0.220 dan Provinsi DIY sebesar 0.427 sebagai provinsi dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia. Sementara di pulau Maluku dan Papua sendiri ketimpangan pendapatan tertinggi dicapai oleh Provinsi Papua yaitu dengan nilai Indeks Gini sebesar 0.412 laju pertumbuhan pendapatan daerah untuk pulau Maluku dan Papua menempati rangking Pertama dari pulau pulau yang ada di Indonesia. Provinsi Papua tergolong provinsi yang laju pertumbuhan ekonominya relatif tinggi dibandingkan dari tahun sebelumnya akan tetapi angka ketimpangannya masih tetap tinggi dan tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kasus ketimpangan di Provinsi Papua menjadi menarik untuk di teliti. Perkembangan indeks gini Provinsi Papua tahun 2013-2018 dapat dilihat sebagai berikut.



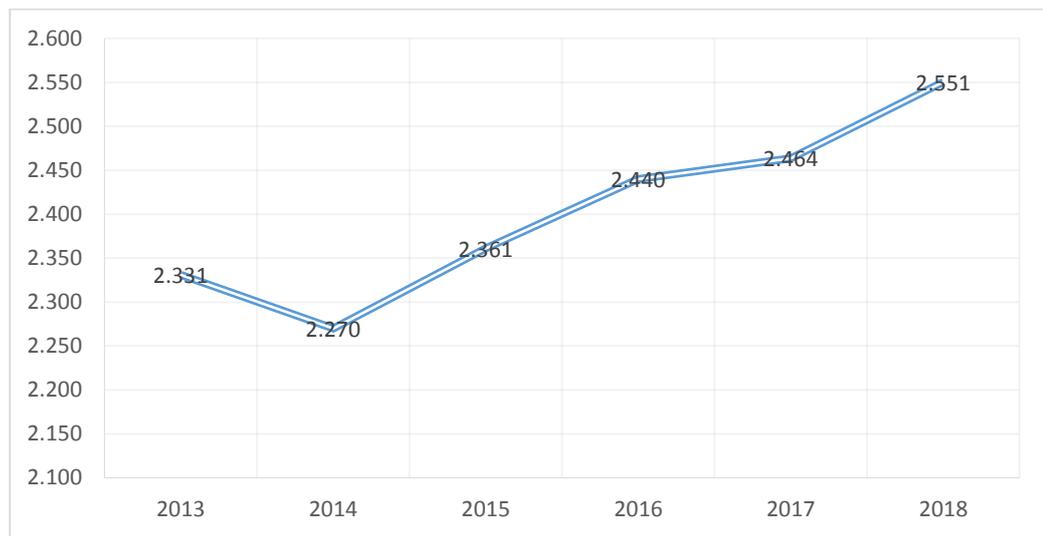
Gambar 1.2 Indeks Gini Provinsi Papua Tahun 2013-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah (2019)

Gambar 1.2 menunjukkan nilai Indeks Gini di Provinsi Papua pada tahun 2013 menjadi salah satu Provinsi dengan Indeks Gini tertinggi di Indonesia yaitu mencapai 0.426, sedangkan kenaikan Indeks Gini tertinggi yang mencapai nilai 0.459 yaitu di tahun 2014 dengan kata lain ada kenaikan yang deratis di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara hingga tahun 2018 Indeks Gini di Provinsi Papua masih tidak mengalami perkembangan yang baik. Pada tahun 2018 Provinsi Papua merupakan provinsi dengan gini rasio yang cukup tinggi yaitu 0,398 hampir mencapai angka 0,4. Dari data tersebut papua menduduki nilai ketimpangan tertinggi ke 4 di Indonesia dan pertama di pulau Maluku dan Papua sementara dilihat dari tahun sebelumnya ketimpangan di Papua tidak ada perkembangan yang cukup baik yaitu masih sama diangka 0,398.

Selain menggunakan Indeks Gini dalam mengukur suatu ketimpangan pendapatan di setiap daerah juga dapat menggunakan Indeks Entropi Theil. Menurut kuncoro (2001). Konsep Entropi Theil dari suatu distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori transformasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Jika Indeks Entropi Theil

semakin besar nilai indeks berarti menunjukkan ketimpangan yang semakin besar, bila indeksnya mengecil maka distribusi pendapatan lebih merata hal ini sejalan dengan Indeks Gini. Berdasarkan perhitungan, berikut data Indeks Entropi Theil Provinsi Papua Tahun 2013-2018 pada gambar 1.3 di bawah ini:



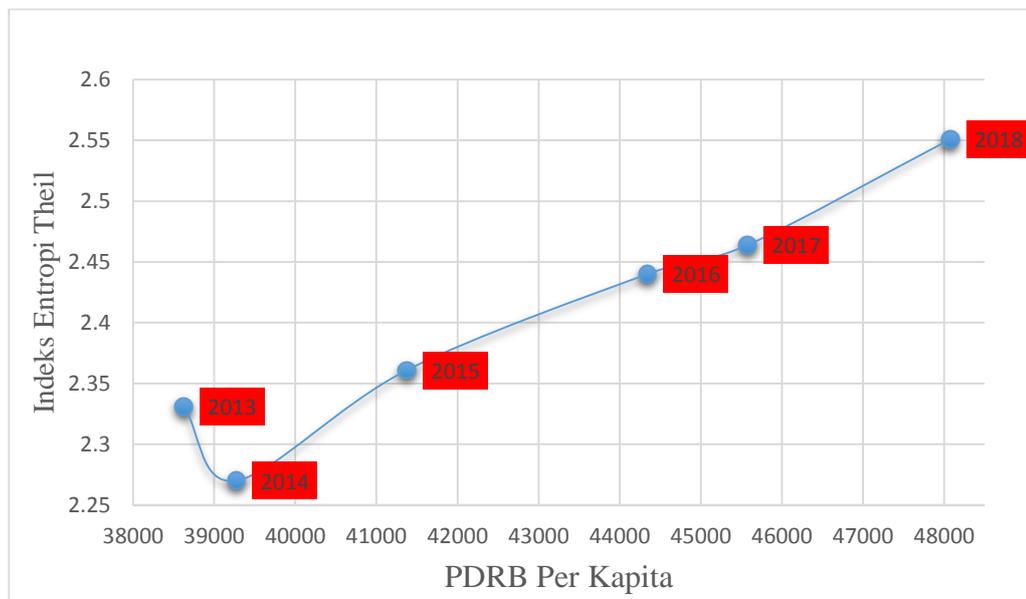
Gambar 1.3 Indeks Entropi Theil Provinsi Papua Tahun 2013-2018

Sumber: data sesudah diolah

Berdasarkan gambar 1.3 di atas menunjukkan nilai Indeks Entropi Theil Provinsi Papua tahun 2013 sebesar 2,331 kemudian di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,61 yaitu menjadi 2,270 sedangkan pada tahun selanjutnya ketimpangan pendapatan yang diukur melalui indeks entropi theil selalu mengalami kenaikan sampai pada tahun 2018 sebesar 2,551. hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Papua selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Menurut Sari (2013) pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dikatakan berhasil ketika semakin rendahnya angka ketimpangan pembangunan antar wilayah dan besarnya pertumbuhan ekonomi. Alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah adalah menggunakan PDRB per kapita.

Suatu daerah dapat dikatakan semakin sejahtera ketika nilai pendapatan Per kapita penduduknya semakin tinggi. Sebaliknya, ketika nilai pendapatan per kapita suatu daerah rendah berarti tingkat kesejahteraan penduduk semakin buruk Thamrin (2001) dalam Sukmaraga (2011).

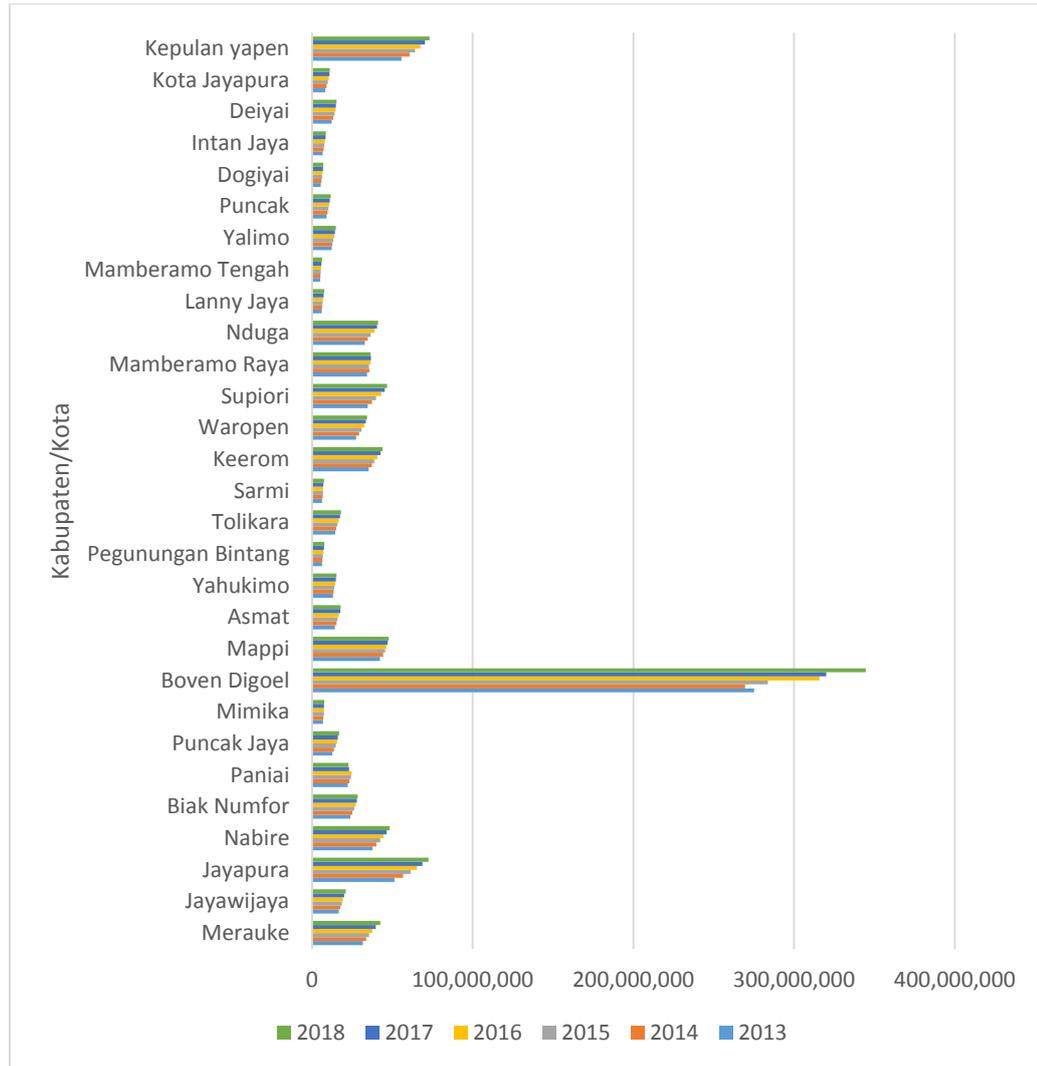


Gambar 1.4 Pendapatan Per kapita dan Indeks Entropi Theil Provinsi Papua Tahun 2013-2018

Sumber: *BPS Papua*, data diolah

Gambar 1.4 menjelaskan PDRB per kapita Provinsi Papua tahun 2013-2018 mengalami peningkatan, namun tidak diimbangi dengan perbaikan kesejahteraan penduduk. Indeks Entropi Theil Provinsi Papua dari tahun 2013-2018 juga relatif meningkat bahkan nilainya terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Oleh karena itu, berarti terjadi ketimpangan pendapatan di Provinsi Papua. Menurut Pauzi & Budiana (2016) laju pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan distribusi pendapatan terdapat korelasi yang positif. Ketika pendapatan per kapita suatu daerah semakin tinggi maka dapat diartikan perbedaan antara penduduk miskin dan penduduk kaya semakin besar.

Jika dilihat dari tiap kabupaten/kota di Provinsi Papua tingkat ketimpangan pendapatan daerah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih relatif tinggi. Penelusuran awal dilihat dari PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua. Adanya ketimpangan terutama pada pendapatan antar daerah dari data PDRB Provinsi Papua yang kabupaten atau kota jumlah pendapatannya tidak merata bahkan ada yang sangat rendah, hal itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Dari data PDRB Provinsi Papua, data terakhir tahun 2018 dapat dilihat bahwa kabupaten atau kota yang memiliki PRDB tertinggi adalah Kabupaten Boven Digoal dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 344.557.272 Sedangkan daerah dengan pendapatan terendah dimiliki oleh Kabupaten Mamberamo Tengah dengan pendapatan hanya sebesar Rp. 6.207.916 hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapatan yang cukup jauh di setiap daerah jika dilihat dari penerimaan PDRB Per kapita. Pendapatan berbagai daerah di Provinsi Papua tersebut jika ditampilkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti berikut :



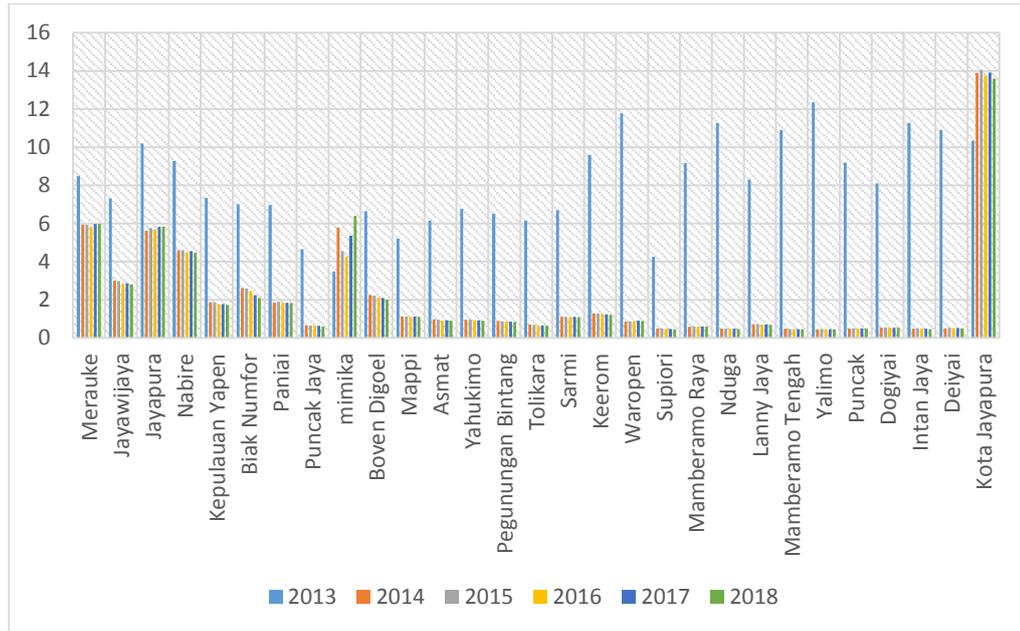
Gambar 1.5 Grafik Pendapatan Daerah di Provinsi Papua Tahun 2013-2018.

Sumber: *BPS Papua*, data diolah.

Gambar 1.5 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antara Kabupaten Boven Digoel dengan Kabupaten Mamberamo Tengah yang terpaut sangat jauh dalam jumlah PDRB per kapita Provinsi Papua dibandingkan dengan daerah lainnya, tingginya perbedaan pendapatan PDRB per kapita di setiap daerah di Provinsi Papua menunjukkan bahwa adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi pula.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara atau daerah. Jika di negara atau daerah tersebut ketimpangannya tinggi maka bisa dikatakan sebagai negara miskin. Menurut Todaro (2004) dengan adanya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan akan menyebabkan berbagai dampak terhadap perekonomian suatu daerah. Dampak positif yang di timbulkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan adalah akan mendorong persaingan antara daerah yang kurang maju dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu melemahnya solidaritas, stabilitas sosial, inefisiensi ekonomi dan ketidakpastian ekonomi daerah tersebut.

Jika di lihat dari permasalahan ketimpangan pendapatan tersebut untuk mengatasinya, tentu harus tahu penyebabnya terlebih dahulu. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan adalah, perubahan tingkat kemakmuran dari waktu ke waktu. Tingkat kemakmuran masyarakat dilihat dari capaian pertumbuhan PDRB per kapita wilayah yang bersangkutan. Kebanyakan suatu daerah yang pertumbuhan PDRB perkapitanya tinggi sangat berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan.



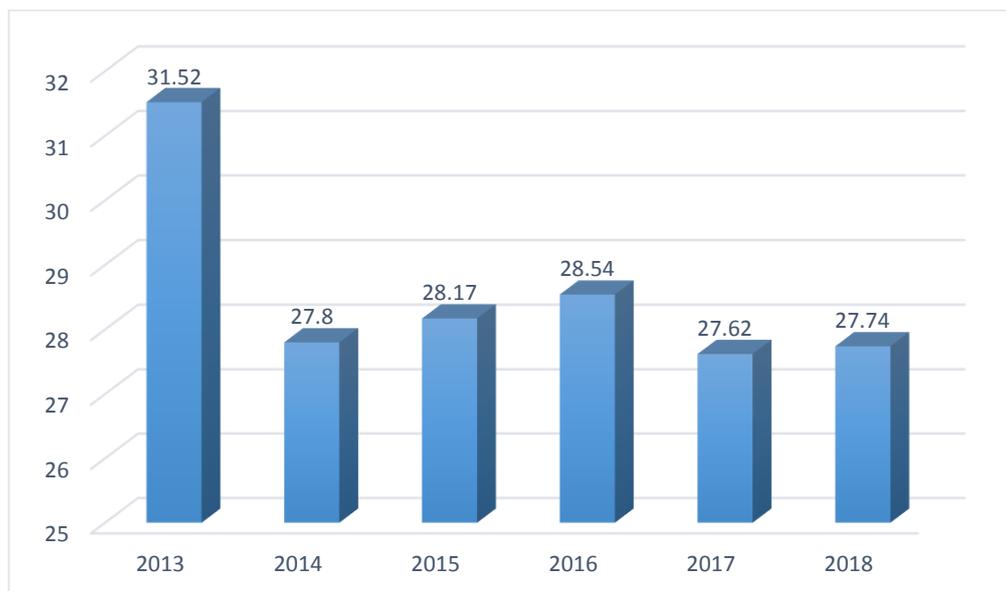
Gambar 1.6 Tingkat pertumbuhan Ekonomi menurut kabupaten/ kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018 (dalam persen)

Sumber: BPS Papua, 2018

Pada Gambar 1.6 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di provinsi Papua selama periode 2013-2018. Pada tahun 2013 semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Kabupaten Yalimo memiliki pertumbuhan PDRB tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 12,35% namun di tahun selanjutnya Kabupaten Yalimo mengalami penurunan pertumbuhan PDRB yang sangat drastis, sementara posisi tertinggi ditempati oleh Kota Jayapura hingga tahun 2018 pertumbuhan PDRB mencapai sebesar 13,6% dan masih banyaknya Kabupaten lain yang pertumbuhan PDRB nya hanya mampu di bawah 1% hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Papua dikarenakan adanya perbedaan Geografi, dan Pembangunan di setiap daerah.

Selain pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat kemiskinan juga dapat menjadi salah satu faktor tingginya ketimpangan pendapatan. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-

hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Jika di daerah tersebut kemiskinan tinggi dapat diasumsikan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan cukup sehingga ketimpangan pendapatan meningkat. Berikut adalah data tingkat kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2013-2018 pada Gambar 1.7 di bawah ini:



Gambar 1.7 Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2013-2018 (dalam persen)

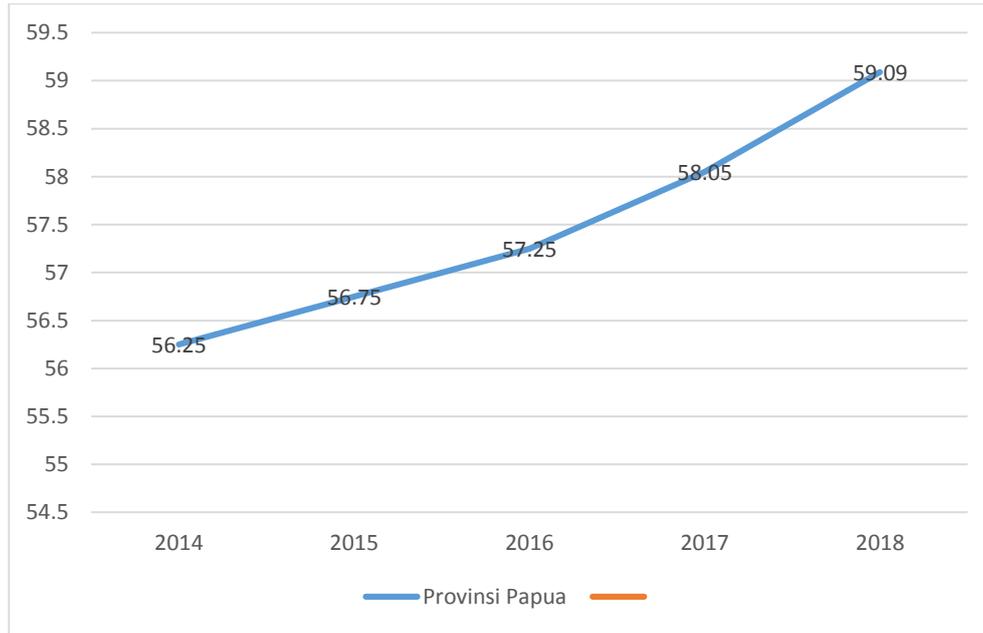
Sumber: BPS Provinsi Papua Tahun 2018

Gambar 1.7 menunjukkan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dari tahun 2013 sampai 2018 selalu mengalami ketidak stabilan. Kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 31,52% sementara kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 27,62%. Sedangkan pada tahun 2018

kemiskinan meningkat menjadi 27,74% yang artinya kemiskinan di Provinsi Papua meningkat 0,12% di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil jika suatu daerah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta pendapatan masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendah atau tingginya IPM di suatu daerah akan mempengaruhi produktivitas penduduk disuatu wilayah, semakin rendah IPM maka akan mempengaruhi produktivitas penduduk sehingga akan mempengaruhi rendahnya pendapatan, begitu juga sebaliknya jika IPM tinggi maka akan tinggi juga produktivitas penduduk yang kemudian akan meningkatkan pendapatan. Sementara di setiap daerah permasalahan IPM yang terjadi berbeda-beda, hal ini yang menjadikan suatu ketimpangan pendapatan disuatu daerah/wilayah.

IPM dibentuk oleh dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup sehat di gambarkan dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi (BPS, 2019). Berikut merupakan data Indeks Pembangunan Ketimpangan di Provinsi Papua terdapat pada gambar 1.3 di bawah ini:



Gambar 1.8 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua tahun 2013-2018

Sumber : BPS Papua 2018

Gambar 1.8 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di provinsi Papua terus mengalami peningkatan sejak tahun 2013-2018. Dan selama tahun 2017 - 2018 Papua menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia. yang berarti kualitas hidup penduduk di Provinsi Papua mengalami peningkatan lebih baik dibandingkan daerah lain. Baiknya kualitas hidup masyarakat tersebut diharapkan akan berdampak pada pendapatan masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya, ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh nilai indeks pembangunan manusia. Apabila indeks pembangunan manusia meningkat maka akan menurunkan angka ketimpangan pendapatan akan berkurang atau merata. Sehingga daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia rendah maka akan tertinggal dari daerah dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi (Putri, Amar, & Aiman, 2015).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari dana perimbangan juga memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan daerah. DAU merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang bertujuan sebagai pemerataan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Sementara DAU dari tahun ketahun akan mengalami peningkatan, dengan adanya DAU yang besar maka dikatakan daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akhirnya akan menimbulkan ketergantungan pemerintah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat (Fattah dan Iman, 2012).

Tujuan adanya DAU yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang berarti untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah (Aryanto, 2011). Peranan DAU terletak pada kemampuan untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhannya dari masing-masing daerah (Undang-Undang No.33 Tahun 2004). Permasalahan dana alokasi umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat. Bagi pusat dana alokasi umum dijadikan instrument horizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi fiscal gap.

DAU dapat mengurangi ketimpangan pendapatan jika DAU digunakan untuk belanja pembangunan dari pada belanja pemerintah, hal ini dapat menambah pemerataan pembangunan di daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan akan mengurangi ketimpangan pendapatan daerah. Berikut adalah Rincian Dana Alokasi Umum Kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018 dapat di lihat di tabel 1.5 di bawah ini:

Tabel 1.3 Rincian Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018 (dalam Juta Rupiah)

Kab/Kota	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Merauke	1.039.461	1.161.465	1.215.754	1.232.994	1.257.424	1.220.130
2	Jayawijaya	584.836	608.582	638.050	715.976	724.393	714.017
3	Jayapura	533.111	597.200	621.020	690.129	707.059	685.570
4	Nabire	545.483	643.898	675.595	709.593	723.707	709.283
5	Kepulauan Yapen	389.582	469.841	490.124	528.159	536.189	547.267
6	Biak Numfor	464.682	525.097	550.028	599.366	612.106	590.680
7	Paniai	440.648	508.843	528.269	595.472	586.340	586.037
8	Puncak Jaya	533.373	632.414	659.625	753.843	751.414	749.825
9	Mimika	506.662	582.499	599.825	621.198	623.223	610.286
10	Boven Digoel	660.845	740.002	783.186	838.786	837.137	831.711
11	Mappi	639.823	728.591	781.105	788.252	785.284	781.328
12	Asmat	744.492	822.115	869.677	899.436	898.025	895.264
13	Yahukimo	556.257	606.921	649.632	747.356	746.447	748.276
14	Pegunungan Bintang	695.878	784.449	818.632	855.885	852.535	851.062
15	Tolikara	507.270	661.681	687.457	741.509	735.957	734.504
16	Sarmi	566.915	667.002	699.066	716.925	715.029	711.726
17	Keerom	432.257	500.546	522.597	555.013	555.250	545.712
18	Waropen	416.243	467.781	496.471	565.381	563.833	562.528
19	Supiori	372.147	409.397	421.570	455.358	457.488	451.175
20	Mamberamo Raya	605.621	409.397	421.570	455.358	457.488	451.175
21	Nduga	439.888	650.845	476.241	726.013	721.555	720.548
22	Lanny Jaya	517.505	594.235	614.605	635.132	631.409	635.655
23	Mamberamo Tengah	491.013	554.042	598.199	633.973	632.365	635.797
24	Yalimo	488.582	567.218	595.901	626.320	621.594	620.837
25	Puncak	624.649	722.726	764.949	811.529	805.691	805.592
26	Dogiyai	388.183	462.109	498.023	496.460	492.360	492.099
27	Intan Jaya	557.180	636.142	660.759	706.243	700.866	700.866
28	Deiyai	336.371	405.596	436.570	471.509	472.115	475.402
29	Kota Jayapura	586.198	624.312	641.368	643.364	680.315	634.301

Sumber: DJPK Kemenkeu 2013-2018

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa ada perbedaan penerimaan dana alokasi umum yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pada tahun 2013 penerimaan dana alokasi umum selalu mengalami penambahan anggaran hingga tahun 2017. Akan tetapi pada tahun 2018 anggaran dana alokasi umum

mengalami penurunan. Perbedaan anggaran dana alokasi umum yang diberikan ke pemerintah daerah diharapkan dapat pemeratakan ketimpangan keuangan disetiap daerah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengeluaran pembangunan. Selain belanja pembangunan, belanja modal juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah dengan menambah aset tetap atau kekayaan pemerintah yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi. Tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja serta dengan adanya fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investasi di masing-masing daerah yang akan mampu mempercepat pembangunan, selain pembangunan infrastruktur namun juga ekonomi sehingga akhirnya akan mengurangi tingkat ketimpangan yang ada. Berikut adalah Rincian Belanja Modal Kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018 dapat di lihat dari tabel 1.4:

Tabel 1.4 Rincian Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018 (dalam Juta Rupiah)

NO	Kab/Kota	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Biak Numfor	89.136	138.239	173.159	263.743	45.532	111.170
2	Jayapura	140.884	216.109	280.185	404.019	171.181	162.268
3	Jayawijaya	312.352	293.930	473.844	372.686	355.434	283.796
4	Merauke	494.333	528.978	657.533	312.370	438.510	462.499
5	Mimika	296.322	437.433	818.738	764.177	500.853	739.236
6	Nabire	107.595	186.191	315.193	225.186	187.771	224.905
7	Paniai	156.499	174.914	218.629	285.582	291.823	135.079
8	Puncak Jaya	145.712	223.797	378.399	399.308	156.451	286.698
9	Kepulauan Yapen	143.183	219.663	273.844	306.437	141.038	226.814
10	Kota Jayapura	232.045	237.601	261.255	216.280	167.474	194.108
11	Sarmi	285.254	273.402	413.981	379.004	251.779	237.109
12	Keerom	115.260	200.027	228.490	218.964	132.907	315.135
13	Yahukimo	174.107	160.611	262.277	289.995	159.094	326.197
14	Pegunungan Bintang	289.400	351.649	394.629	405.853	334.235	304.186
15	Tolikara	224.047	319.866	384.198	300.448	188.388	367.369
16	Boven Digoel	383.806	444.918	353.177	310.453	287.478	399.009
17	Mappi	226.649	252.189	306.716	272.742	177.681	222.425
18	Asmat	333.146	312.534	282.488	367.853	415.346	294.411
19	Waropen	196.733	252.570	263.051	248.361	250.914	190.816
20	Supiori	226.601	295.009	215.639	165.105	176.426	156.062
21	Mamberamo Raya	288.500	303.339	353.638	466.920	270.206	236.009
22	Mamberamo Tengah	273.674	384.475	465.553	556.589	350.197	325.524
23	Yalimo	321.290	351.681	401.608	408.770	263.524	306.941
24	Lanny Jaya	277.361	384.155	506.035	398.975	274.035	299.499
25	Nduga	229.131	269.894	441.181	362.157	323.231	418.218
26	Puncak	268.113	311.822	677.895	448.487	168.913	181.683
27	Dogiyai	230.895	307.304	318.489	311.567	271.850	208.747
28	Intan Jaya	383.913	379.952	394.987	312.379	368.768	405.536
29	Deiyai	183.531	196.641	258.957	271.970	159.576	189.727

Sumber: DJPK Kemenkeu 2013-2018

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa ada perbedaan anggaran belanja modal dari setiap daerah. Pada tahun 2013 pengeluaran belanja modal selalu mengalami penambahan anggaran hingga tahun 2018. Kenaikan anggaran belanja modal di setiap daerah diharapkan dapat pemeratakan pembangunan sehingga dapat

meningkatkan produktifitas masyarakat serta meningkatkan pembangunan ekonomi.

Sementara faktor yang mempengaruhi ketimpangan dari satu daerah dengan daerah lain tidak selalu sama. Karena adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki setiap wilayah mengakibatkan perbedaan pendapatan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Keberhasilan pembangunan ekonomi bisa dilihat dari nilai pertumbuhan PDRB daerah/wilayah setiap tahunnya, dimana suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terdapat peningkatan nilai PDRB dari tahun sebelumnya. Namun tinggi rendahnya angka PDRB belum tentu mencerminkan adanya pemerataan distribusi pendapatan. Menurut Kuznet, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan cenderung mengalami ketimpangan yang tinggi sampai pada titik tertentu. Pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan mulai membaik atau mengalami pemerataan.

Laju pertumbuhan ekonomi daerah antar Pulau di Indonesia rata-rata mengalami penurunan. Akan tetapi di Pulau Maluku dan Papua mengalami peningkatan sebesar 6,99% pada tahun 2018 naik dari tahun sebelumnya yaitu 4,89% namun distribusi PDB Nasional Pulau Maluku dan Papua hanya berkontribusi sebesar 2,47% pada tahun 2018. Sementara rata-rata angka indeks gini Provinsi Papua pada tahun 2013-2018 sebesar 0,412 angka tersebut

menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Papua termasuk kategori parah.

Pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan angka ketimpangan yang tinggi pula, maka hasil pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Provinsi Papua mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tetapi tidak diimbangi dengan ketimpangan pendapatan yang justru naik. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Papua ini dapat dilihat dari PDRB per kapita setiap daerah di kabupaten/kota Provinsi Papua yang timpang. Hal tersebut dikarenakan naiknya tidak meratanya pembangunan yang mengakibatkan perbedaan pertumbuhan ekonomi, karena masih rendahnya pembangunan sehingga ketimpangan antar daerah di Provinsi Papua masih dalam kategori tinggi, jika dana alokasi umum DAU dan Belanja Modal dimanfaatkan untuk belanja pembangunan dari pada belanja rutin maka hal ini dapat meningkatkan pembangunan. Di sisi lain, indeks pembangunan manusia juga merupakan indikator penting yang dapat mempengaruhi adanya ketimpangan. Serta kemiskinan juga menjadi salah satu faktor ketimpangan, karena jika di daerah tersebut tingkat kemiskinannya tinggi dapat dikatakan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah.

1.3 Cakupan Masalah

Agar penelitian dapat lebih terarah, maka cakupan masalah dalam penelitian ini adalah membahas mengenai ketimpangan distribusi pendapatan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dana alokasi umum dan belanja modal.

1.4 Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Namun dengan ketidak meratanya pembangunan akan menimbulkan permasalahan yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini terjadi ketika suatu daerah merencanakan pembangunan, tidak dilakukan dengan baik.

Dari latar belakang yang dijelaskan Provinsi Papua menempati ketimpangan tertinggi ke 4 dibandingkan dengan Provinsi lain, tetapi pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua menempati posisi pertama di Pulau Maluku dan Papua, sementara dilihat dari PDRB perkapita Provinsi Papua selalu mengalami peningkatan tetapi tidak diimbangi dengan pemerataan pendapatan , yang akhirnya ketimpangan pendapatan semakin meningkat. Oleh karena itu angka kesenjangan distribusi pendapatan perlu diturunkan sehingga masyarakat suatu daerah dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Menurut Todaro dan Smith (2006) daya beli sebagian masyarakat akan menurun ketika ada masalah kesenjangan pendapatan karena hasil pembangunan ekonomi suatu daerah hanya di nikmati oleh masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas. Oleh karena itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua tahun 2013-2018?

2. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua 2013-2018?
3. Bagaimana pengaruh IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua 2013-2018?
4. Bagaimana pengaruh dana aloksi umum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua 2013-2018?
5. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua 2013-2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua tahun 2013-2018.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua tahun 2013-2018.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua tahun 2013-2018.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua tahun 2013-2018.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua tahun 2013-28

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian keilmuan dalam bidang ekonomi. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam rangka mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di daerah.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti serta mengasah daya analisis dalam memecahkan masalah ekonomi terkait dengan ketimpangan distribusi pendapatan.

1.7 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan kebaruan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan dan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Adapun kebaruan dari penelitian ini antara lain.

1. Penelitian ini berfokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua.
2. Variabel penelitian yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, IPM, DAU dan belanja modal. yang mana pada penelitian

terdahulu tidak ada yang secara khusus meneliti tentang ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua.

3. Penelitian ini mengacu dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pangkirno, dkk (2016) yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara”. Penelitian yang dilakukan Pangkirno, dkk (2016) menggunakan variabel ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur menggunakan indeks gini sebagai variabel dependen dan variabel independen terdiri dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur menggunakan indeks entropi theil sebagai variabel dependen dan variabel independen terdiri dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dana alokasi umum dan belanja modal kabupaten/ kota.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Teori Utama

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi mengandung arti yang sangat luas dan mencakup perubahan pada setiap susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk pada suatu negara dalam jangka waktu panjang yang disertai perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 1999 : 11).

Menurut Todaro (2001), dalam Setiawan 2016, mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi dan menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Salah satu alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri (Sukirno, 2004).

Menurut Afrizal (2013) mengatakan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

- a. Pertumbuhan (*growth*), tujuan yang pertama yaitu mencegah terjadinya kelangkaan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya alam agar dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif sehingga mendorong pertumbuhan.
- b. Pemerataan (*equity*), dalam hal ini memiliki implikasi dalam pencapaian tujuan yang kedua yaitu sumber daya berkelanjutan, oleh karena itu tidak boleh hanya fokus pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati oleh semua pihak dengan adanya pemerataan.
- c. Berkelanjutan (*sustainability*), sedangkan tujuan berkelanjutan yaitu pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

2.1.1.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya – sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999 : 298)

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak mudah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sekaligus dengan pemerataan pendapatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat

Statistik (BPS), sebagian besar wilayah di Indonesia masih mengalami tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi. Realita yang terjadi adalah ketimpangan distribusi pendapatan semakin meningkat seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Masalah ketimpangan menjadi sangat penting untuk segera diatasi, mengingat tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk kesejahteraan rakyat bersama, bukan hanya sebagian rakyat.

2.1.2 Distribusi Pendapatan

Menurut Soediyono (1992) distribusi pendapatan merupakan total hasil yang diterima oleh masyarakat dalam waktu tertentu yang merupakan balas jasa atas adanya faktor-faktor produksi nasional yang tergolong dari sumber daya alam, modal, sumber daya manusia, serta kemampuan berwirausaha. Sehingga dapat di artikan bahwa pendapatan yang di peroleh masyarakat akibat adanya balas jasa terhadap suatu pekerjaan yang sudah dilakukan. Pendapatan ini berasal dari adanya sektor formal maupun non formal. Menurut (Sukirno, 2006) distribusi pendapatan terdapat dua yaitu distribusi pendapatan relatif yang merupakan perbandingan antara total pendapatan yang sudah diterima oleh sekelompok penerima pendapatan tersebut. Sedangkan distribusi pendapatan mutlak merupakan persentase masyarakat yang mendapatkan pendapatan yang mencapai pendapatan yang tertentu ataupun kurang dari padanya. Selain itu pemetaan dalam distribusi pendapatan ada tiga kategori yaitu pembagian distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, pembagian distribusi pendapatan antar daerah desa dan kota, serta pembagian distribusi pendapatan antar wilayah Kabupaten/Kota (Dumairy, 1996).

2.1.2.1 Teori Ketimpangan Distribusi Pendapatan

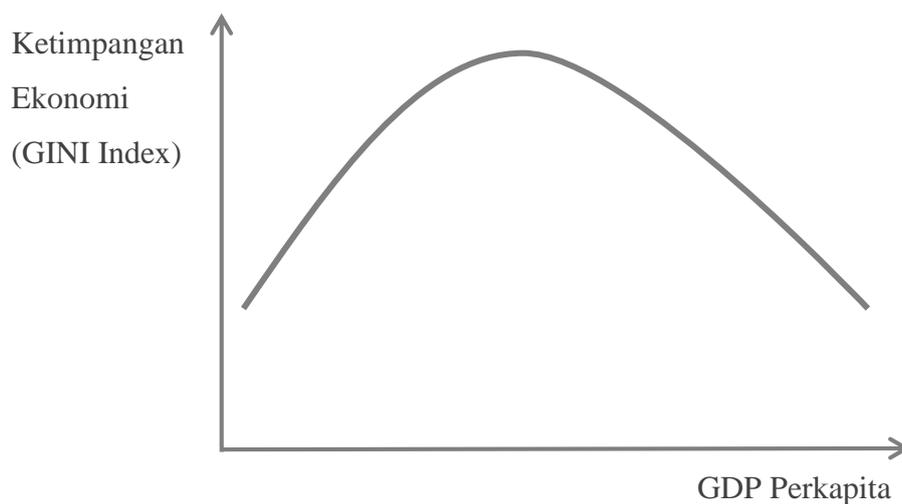
Menurut Musfidar (2012) Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena adanya efek perembasan kebawah (*trickle down effect*) dari output secara sempurna. Hasil output nasional hanya dinikmati oleh segelintir golongan minoritas dengan tujuan tertentu.

Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi cenderung akan lebih terpusat pada sektor industri modern, lapangan pekerjaan cenderung terbatas tetapi upah yang diterima dan tingkat produktivitas terhitung tinggi. Pada tahap awal ketimpangan pendapatan antara sektor industri modern dengan sektor pertanian mengalami peningkatan dengan cepat namun sebelum kemudian mengalami penyusut. Ketimpangan pendapatan cenderung lebih tinggi pada daerah dengan sektor industri modern dari pada suatu daerah yang menggunakan sektor pertanian yang relatif tetap (Todaro, 2006).

Kuznet juga mengungkapkan bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan pada tahap awal cenderung semakin meningkat karena adanya perekonomian yang mengalami penurunan yang cukup besar dalam pendistribusian pendapatan, kemudian setelah tahap pembangunan berikutnya ketimpangan distribusi pendapatan cenderung menurun karena distribusi pendapatan sudah lebih merata. Dalam jangka pendek terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan ketimpangan

pendapatan namun kemudian dalam jangka panjang hubungannya adalah negatif. Permasalahan dalam pembangunan antar daerah ini diakibatkan adanya sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang berbeda di setiap daerah sehingga proses pembangunan di setiap daerah juga mengalami perbedaan yang kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan antar daerah (Hutabarat, 2015).

Kuznet (1955) telah meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di negara-negara maju. Hasil pengolahan data *time series* ini menunjukkan adanya pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan. Tahap awal pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan memburuknya distribusi pendapatan. Hal ini terus terjadi sampai pada suatu titik dimana pertumbuhan ekonomi diikuti dengan membaiknya distribusi pendapatan. Sehingga apabila disajikan dalam kurva, pola hubungan ini akan membentuk U-terbalik

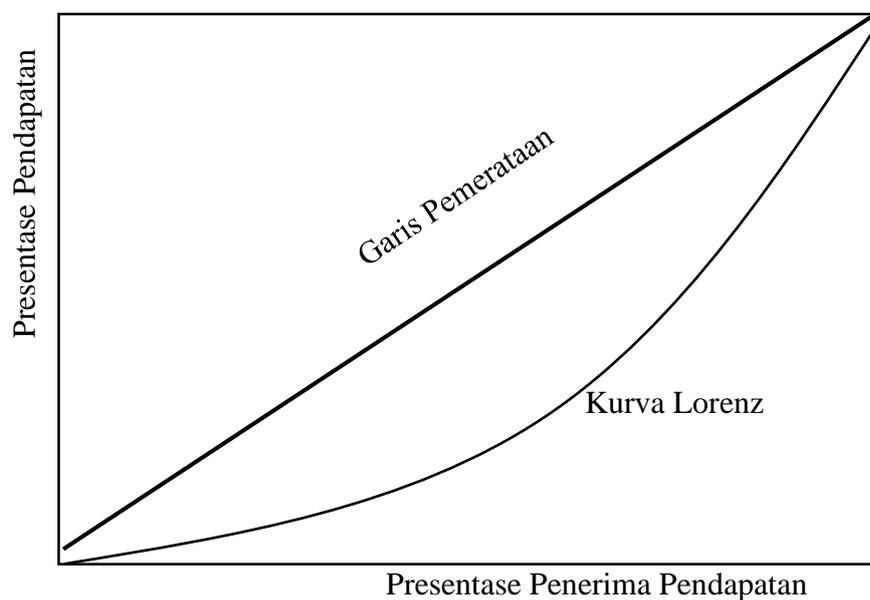


Gambar 2.1 Kurva Kuznet "U-Terbalik"

2.1.2.2 Pengukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan

a. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz pertama kali ditemukan oleh seorang ahli statistik asal Amerika bernama Conrad Lorenz. Kurva ini berbentuk dalam sebuah bujur sangkar dimana sisi vertikal mewakili persentase kumulatif pendapatan dan sisi horizontal mewakili persentase kumulatif penduduk sebagai penerima pendapatan (Dumairy, 1996) Kurvanya ditempatkan pada diagonal bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menandakan bahwa distribusi pendapatan nasional yang semakin merata, sebaliknya jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka menunjukkan keadaan yang semakin buruk, dan distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata (Arsyad, 1997).



Gambar 2.2 Kurva Lorenz.

Apabila akan menentukan seberapa besar ketimpangan pendapatan dengan menggunakan kurva Lorenz yaitu dengan melihat seberapa dekat dan jauhnya garis lengkungan terhadap garis diagonal. Garis lengkung yang semakin

mendekati garis diagonal maka distribusi pendapatan dimasyarakat semakin merata namun ketika garis lengkungan semakin menjauh dengan garis diagonal maka distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat semakin memburuk (semakin timpang). Adapun cara dalam menggambarkan kurva lorenz dapat dilakukan sebagai berikut:

1. dengan mengurutkan antara data pengeluaran, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar.
2. menentukan antara desil pertama sampai dengan desil kesepuluh dalam distribusi data.
3. menghitung seberapa besar distribusi pendapatan yang terdapat pada masing-masing kelompok desil.
4. menentukan kumulatif persentase pendapatan yang terdapat pada masing-masing kelompok desil.
5. menghitung persentase kumulatif distribusi pendapatan pada masing-masing desil.
6. memetakan dalam plot 2 dimensi yaitu seluruh desil berada di sisi horizontal dan persentase kumulatif distribusi pendapatan di sisi vertikal.

Menggunakan kurva lorenz, maka ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat dapat dilihat melalui area timpang yang sudah terbentuk dengan adanya garis lengkung dan garis diagonal di dalam kurva. Dengan begitu perubahan besaran angka ketimpangan pada waktu ke waktu maupun perbandingan antar tempat tidak mudah untuk dibedakan. Dan pengukuran secara kuantitatif dapat menggunakan perhitungan yang ada di dalam indeks gini.

b. Bank Dunia

Menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung presentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk.

- a. Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
- b. Tingkat ketimpangan sedang apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional.
- c. Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan nasional.

c. Indeks Gini

Indeks gini sebagai metode perhitungan yang sering digunakan dalam melihat seberapa besar angka ketimpangan pendapatan yang terjadi (BPS,2013). perhitungan dengan menggunakan indeks gini didapatkan dengan menghitung luas daerah di antara garis diagonal yang merupakan garis pemerataan sempurna dengan kurva lorenz dan kemudian di bandingkan dengan luas total dari setengah bujur sangkar dimana terdapatnya kurva lorenz (Arsyad, 2010), masyarakat yang memiliki pengeluaran perkapita per bulan kemudian diurutkan mulai dari pengeluaran perkapita terendah sampai dengan tertinggi dan kemudian dibentuk golongan-golongan setiap 10% mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Selanjutnya dilakukan perhitungan frekuensi presentase dan kumulatif presentase bagi masyarakat yang memperoleh pendapatan maupun pendapatan yang diterima. Angka kisaran dalam menentukan ketimpangan pendapatan dengan menggunakan

indeks gini yaitu antara 0 sampai 1. Apabila angka indeks gini yang dihasilkan mendekati angka 0 menunjukkan bahwa terjadi pemerataan pendapatan antar masyarakat (pemerataan sempurna) namun apabila angka indeks gini mendekati 1 menandakan bahwa pendapatan yang diterima oleh masyarakat semakin timpang (ketimpangan tinggi).

Menurut Dumairy (1997). Berikut adalah perhitungan nilai Indeks Gini:

$$\text{Indeks Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1}) / 10.000$$

Keterangan :

P_i : Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i

Q_i : Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas pengeluaran ke-i

k :Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk

d. Indeks Williamson

Menurut Sjafrizal (2012), Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Formulasi Indeks Williamson secara statistik dapat ditampilkan dengan formula sebagai berikut .

$$IW = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - Y)^2 \left(\frac{f_i}{N}\right)}{Y}}$$

Dimana:

IW : Indeks Williamson

Y_i : PDRB Per kapita tiap Kabupaten/Kota

Y : PDRB Per kapita Provinsi

F_i : Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/Kota

n : Jumlah Penduduk Provinsi

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai berkisar antara angka 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson menurut Tambunan, (2003) :

- a. 0 s/d 0,5 tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah rendah.
- b. 0,5 s/d 1 tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah tinggi

e. Indeks Ketimpangan Entropi Theil

Menurut Kuncoro, (2004) konsep entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional dan distribusi produk domestik bruto dunia. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto provinsi, Ying menggunakan indeks ketimpangan regional. Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua subindikasi yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah atau regional (Ying, 2000: 60). Dengan menggunakan alat analisis indeks entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten. Indeks ketimpangan entropi Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu. Indeks ketimpangan entropi Theil juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis

selama periode tertentu, sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ketimpangan spasial. Sebagai contoh kesenjangan/ketimpangan antardaerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan (Kuncoro, 2004: 87). Sedangkan formulasi Indeks Entropi Theil tersebut sebagai berikut :

$$I(y) = \sum (y_j/Y) \times \log[(y_j/Y)/(x_j/X)] \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan ;

$I(y)$ = Indeks ketimpangan Entropi Theil

y_j = PDRB per kapita kabupaten j

y = Rata-rata PDRB per kapita Provinsi

x_j = Jumlah penduduk Kabupaten j

X = Jumlah penduduk Provinsi

Penelitian ini menggunakan perhitungan ketimpangan Indeks Entropi Theil dikarenakan terdapat beberapa kelebihan, yaitu (Sjafrizal, 2012).

1. Indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas.
2. Dengan menggunakan indeks ini dapat pula dihitung kontribusi masing-masing daerah terhadap ketimpangan ekonomi secara keseluruhan sehingga dapat memberikan kebijakan yang cukup penting.
3. Sifatnya tidak sensitif terhadap skala daerah dan tidak terpengaruh oleh nilai nilai ekstrim.
4. Independen terhadap jumlah daerah sehingga dapat digunakan sebagai pembanding dari sistem regional yang berbeda-beda.

Dengan indikator bahwa apabila semakin besar nilai Indeks Entropi Theil atau semakin besar lebih dari 1 maka semakin besar ketimpangan yang terjadi sebaliknya apabila semakin kecil atau semakin mendekati 0 nilai Indeks Entropi Theil maka semakin merata (Sjafrizal, 2012).

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat di artikan sebagai pertumbuhan output atau penambahan pendapatan nasional secara agregat dalam kurun waktu tertentu misalnya satu tahun. Atau bisa juga di artikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan GDP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 2010). Dalam lingkup negara, pertumbuhan ekonomi provinsi satu dengan provinsi lain biasanya memiliki laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap provinsi memiliki karakteristik masing-masing. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di dalam suatu wilayah (Adisasmita, 2013).

2.1.3.1 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Menurut Adisasmita (2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yaitu sebagai berikut:

1. Ketidak seimbangan Pendapatan

Keadaan daerah yang ideal, dimana pendapatan mutlak didistribusikan secara adil yaitu 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari

total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi menjadi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Kemudian indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

2. Perubahan Struktur Perekonomian

Daerah yang maju, suatu pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi atau peran sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan naik. Sektor industri memiliki peran penting dalam perekonomian regional. Sektor industri dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang di hasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

3. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran keberhasilan ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yaitu dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

Menurut Tarigan (2004) ada tiga metode pendekatan yang digunakan dalam menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu:

a. Pendekatan produksi

Merupakan perhitungan dengan menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan dari seluruh sektor ekonomi suatu negara selama satu periode tertentu.

b. Pendekatan pendapatan

Merupakan perhitungan yang meliputi penjumlahan seluruh pendapatan yaitu upah, sewa, bunga dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.

c. Pendekatan pengeluaran

Merupakan perhitungan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Dalam metode pendekatan pengeluaran ini dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi yaitu rumah tangga, pemerintah, investasi, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor.

Menurut Sukirno (2004) dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto dibentuk menjadi dua macam yaitu :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

Pengertian PDRB atas dasar harga konstan menurut BPS adalah keseluruhan nilai tambah produksi barang serta jasa yang dihitung dengan harga suatu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar yang mana dalam penelitian ini menggunakan tahun dasar 2010. Dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Pengertian PDRB atas dasar harga berlaku menurut BPS ialah nilai tambah yang diperoleh dari sektor ekonomi secara keseluruhan yang mana nilai tambah yang diperoleh dihitung dengan harga pada setiap tahunnya yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar struktur perekonomian dan peranan dalam sektor ekonomi.

2.1.3.2 Teori Harrod-Domar.

Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. . Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sadono, 2007: 256-257).

2.1.3.3 Teori Rostow dan Musgrave

Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan

pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air sehingga pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pada tahap lanjut, Rostow berpendapat bahwa pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program

pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Sementara itu, Dalam satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta terhadap GNP semakin besar. Tetapi rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil.

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak disadari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. (Dumairy, 1997: 163)

2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995).

Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut

miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pemanfaatan sumber daya alam sangat tergantung oleh kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola sumber daya alam tersebut. Menurut Aloysius (Arsyad, 2010) sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi mempengaruhi perkembangan manusia melalui tingkat pendapatan, distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sedangkan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang baik

sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Hasil dari pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas hidup manusia. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengukuran ini melalui pencapaian rata-rata sebuah wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu angka harapan hidup saat kelahiran, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta kemampuan daya beli. Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choices of people*). IPM diperkenalkan oleh UNDP (1990) dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*).

IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran ini melalui pencapaian rata-rata sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu *longevity*/umur panjang dan sehat yang diukur dengan angka harapan hidup (AHH) saat kelahiran, pengetahuan diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (MYS), serta *decent living standard*/standar hidup layak diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

Menurut UNDP, (1995) Indeks tiga komponen IPM dapat dihitung dengan membuat perbandingan selisih nilai indikator penentu dan nilai

minimumnya dengan selisih penentu indikator maksimum dan minimum atau seperti formula dibawah ini:

$$\text{Indeks } X_{(i)} = [X_{(i)} - X_{(i)min}] / [X_{(i)maks} - X_{(i)min}]$$

Keterangan :

$X_{(i)}$ = Indikator ke-i (I=1,2,3)

$X_{(i)min}$ = nilai minimum $X_{(i)}$

$X_{(i)maks}$ = nilai maksimum $X_{(i)}$

Kisaran antara nilai minimum dan maksimum untuk indikator yang tercakup sebagai komponen IPM adalah :

- 1) Harapan hidup kelahiran : 25 – 85
- 2) Tingkat melek huruf : 0 – 100
- 3) Rata-rata lama sekolah : 0 – 100
- 4) Konsumsi per kapita yang disesuaikan : 300.000 – 732.720

Berdasar prosedur di atas, IPM dapat dihitung dengan rumus sebagaiberikut :

$$\text{IPM} = 1/3 [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$$

Keterangan :

$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup kelahiran.

$X_{(2)}$: Indeks pendidikan. { 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah) }

$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak / paritas daya beli.

IPM mengukur kinerja pembangunan manusia dengan skala 0-1. Nol sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah dan satu sebagai tingkatan pembangunan manusia yang tertinggi (Kuncoro, 2012). Perkembangan

IPM di Indonesia secara umum terus mengalami peningkatan (BPS, 2013). Hal ini terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM pada periode tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran dari komponen IPM yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapit.

2.1.6 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan yang memiliki kontribusi terbesar dari seluruh jumlah penerimaan daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang di berikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemeratakan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk mengatasi ketimpangan keuangan antar pemerintah daerah karena ketidak merataan sumber daya yang sudah ada oleh masing masing daerah (Prakokoso, 2004).

DAU merupakan transfer yang *Block Grant* artinya penggunaannya di serahkan kepada daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Setiap provinsi dan kabupaten/kota mendapat alokasi DAU besaran ditetapkan sekurang kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.

2.1.7 Belanja Modal

Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja modal pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja sehingga akan memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang berarti pengangguran akan menurun, lebih banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya akan menuju pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2007). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan Belanja Modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaat cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin biaya operasional dan pemeliharaan. Pengeluaran ini dilakukan pemda untuk melaksanakan wewenang dan atas tanggung jawab nya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (pemerintah pripinsi/pemerintah pusat).

2.2 Kajian Variabel

2.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro, 2004).

Menurut Fitriyah dan Rachmawati, (2012) ketimpangan pada negara sedang berkembang relatif lebih tinggi karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik sedangkan daerah yang masih terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itulah, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan.

Para ekonomi neo-klasik mengemukakan pertumbuhan ekonomi cenderung akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan walaupun masih dalam tahap awal pertumbuhan. Bukti empiris dari pandangan ini berdasarkan pengamatan di beberapa negara seperti, Taiwan, Hongkong, Singapura dan RRC. Kelompok NeoKlasik sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada prakteknya cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Tarmidzi, 2012)

Menurut penelitian yang telah dilakukan Kuznets, menyimpulkan bahwa korelasi pertumbuhan dan ketimpangan sangat kuat, pada permulaannya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan ketimpangan yang disebabkan belum meratanya distribusi pendapatan, namun setelah tahapan yang lebih lanjut pemerataan akan semakin tercapai kemudian tingkat ketimpangan akan mengalami penurunan. Kuznets menggambarkan pola peningkatan dan penurunan tersebut dengan metode U terbalik yang ia ciptakan setelah meneliti kesenjangan diberbagai negara.

Barro (1999) menyatakan bahwa data panel yang meliputi banyak negara menunjukkan adanya hubungan yang lemah antara laju pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan. Untuk pertumbuhan ekonomi, terdapat indikasi bahwa ketimpangan memperlambat pertumbuhan di negara miskin, tetapi mendorong pertumbuhan di negara kaya. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Nikoloski (2009) menyatakan bahwa pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Solehah (2013). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marcan, (2013) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan.

2.2.2 Pengaruh Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan relatif (Badrudin, 2017). Kemiskinan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan antara kaya dan miskin semakin timpang. Seperti yang diungkapkan oleh Arsyad (2017) tidak tercapainya pengurangan yang berarti pada angka kemiskinan mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di Negara

berkembang semakin meningkat. Oleh sebab itu, penurunan kemiskinan sangat diperlukan, agar ketimpangan pendapatan di masyarakat semakin rendah. Adapun beberapa penelitian terkait hubungan pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan sebagai berikut. Dalam penelitiannya, Hassan et al. (2015) menyatakan bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan positif antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Menurut Syawie (2011) mengungkapkan bahwa pada proporsi tertentu, kemiskinan memang berkaitan dengan kesenjangan. Akan tetapi, kemiskinan yang berkurang bukan berarti akan mengurangi ketimpangan. Penemuan Syawie juga didukung oleh Marashdeh (2017) yang menyatakan bahwa angka kemiskinan yang semakin rendah justru menaikkan ketimpangan, sehingga solusi atau langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan dapat bersifat memihak pada ketimpangan, melainkan dibiarkan ketimpangan semakin naik. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa penafsiran terkait hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hindun, Soejoto, Haryanto (2019) menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah.

2.2.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Indeks pembangunan manusia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan manusia, yakni angka harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita. Sehingga indeks pembangunan manusia merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi

suatu negara ataupun daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada pendapatan masyarakat sehingga menyebabkan distribusi pendapatan. Maka bisa dikatakan jika indeks pembangunan manusia meningkat tentunya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat sehingga mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang digunakan untuk merepresentasikan kualitas sumber daya manusia. Komponen dari IPM sendiri adalah angka harapan hidup saat kelahiran, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan paritas daya beli. Sementara di provinsi Papua sendiri masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang baik. Sehingga, akan dianalisis apakah peningkatan kualitas penduduk dapat mengurangi ketimpangan ataukah sebaliknya. Tingkat IPM yang tinggi maka akan pengaruh terhadap kesenjangan masyarakat yang tinggi pula. Hal ini sejalan dengan penelitian Purbadharmaja dkk (2017) yang dimana IPM berpengaruh negatife dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Wicaksoni (2017) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Timur. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Robby (2018) menunjukkan bahwa ipm berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

2.2.4 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan yang memiliki kontribusi terbesar dari seluruh jumlah penerimaan daerah. Dana

Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang di berikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemeratakan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk mengatasi ketimpangan keuangan antar pemerintah daerah karena ketidak merataan sumber daya yang sudah ada oleh masing masing daerah (Prakokoso 2004).

DAU yang di berikan dari pemerintah pusat setiap tahunya mengalami kenaikan. Dengan adanya alokasi dana yang baik maka akan menciptakan keseimbangan serta keselarasan bagi masyarakat yang ada pada daerah, hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah. dengan adanya pembangunan dari pemanfaatan DAU, DAU dapat mengurangi ketimpangan pendapatan jika dengan asumsi DAU lebih dipergunakan untuk belanja pembangunan daripada untuk belanja rutin.

Menurut penelitian Putri dkk (2014) menyebutkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan jika dana alokasi umum semakin tinggi penyebaranya di setiap daerah dari nilai rata-rata seluruh daerah semakin tinggi pula kesenjangan antar kabupaten. Serta penelitian yang dilakukan Fauzan (2019) DAU berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DIY.

2.2.5 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Teori Harord Domar, Rostow dan Musgrave, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni akan semakin meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi

kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.

Teori Harrod Domar menyebutkan salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. Semakin banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah capital stock sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori yang dikemukakan tersebut, tentunya secara linier menunjukkan alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja modal pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja sehingga akan memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang berarti pengangguran akan menurun, lebih banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya akan menuju pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Menurut Halim (2008:5) Belanja modal yang didefinisikan sebagai belanja/biaya pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu tahun.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah dengan penambah aset tetap atau kekayaan pemerintah yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anshari (2019) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Putri, (2015) yang menyatakan Belanja modal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi. Tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja serta dengan adanya fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investasi dimasing-masing daerah yang akan mampu mempercepat pembangunan ekonomi sehingga akhirnya akan mengurangi tingkat ketimpangan yang ada.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Arif& Wicaksoni. 2017)	Dependen : Ketimpangan pendapatan Independen : IPM, pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk	Analisis Regresi Data Panel	Model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model random effect. IPM mempunyai hubungan positif dan signifikan. Selain itu hubungan variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan yaitu negatif tidak signifikan.
2.	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara (Pangkiro,rotinsulu, wuaran 2016)	Dependen: ketimpangan pendapatan Independen: pertumbuhan ekonomi, kemiskinan	Analisis Regresi linier	Variabel Pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi terhadap ketimpangan pendapatan, sementara variabel kemiskinan mempengaruhi positif dan signifikan

				terhadap ketimpangan pendapatan.
3.	Economic and Political Determinants of Income Inequality (Zlatko Nikoloski 2009)	Dependen: Ketimpangan Pendapatan Independen: Democracy, Ores Metal Exports, Oli and Gas Production, Long GDP per capita, Log of GDP per capita squared, Industry Value Added, GDP growth, Credit to Private Sector, Trade Openness, Government Expenditure, Size of the Country, error term	GMM (Generalized method of moment)	Semua variabel signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan kecuali variable demokrasi. Sedangkan untuk GDP per kapita berpengaruh positif pada jangka pendek dan negatif pada jangka panjang
4.	Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Hindun, Soejoto, Haryanto 2019)	Dependent: Ketimpangan pendapatan Independent: Pendidikan, pengangguran, kemiskinan	Analisis Regresi data panel	Variable pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara, pengangguran tidak mempengaruhi ketimpangan, sedangkan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
5.	Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah	Dependent: ketimpangan Pendapatan	Analisis Regresi data panel	Variable pendidikan tidak mempengaruhi ketimpangan

	Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi di Indonesia (Anshari, Azhar, Ariusni 2018)	Independent: Pendidikan, UMP, Belanja Modal		pendapatan, sementara variable UMP berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, serta variable Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan
6.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal dan Tingkat Pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur (Ni'matush Sholihah 2013)	Variabel Dependen: disparitas pendapatan Variabel Independen: pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, penanaman modal (investasi)	Analisis Regresi Data Panel	Variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan. 2. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN perkapita) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan. 3. Variabel Penanaman Modal Asing (PMA perkapita) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan. 4. Variabel tingkat pendidikan (rasio tingkat pendidikan SD dan rasio tingkat pendidikan

				SLTA) secara parsial mempunyai pengaruh
7.	Determinants of Income Inequality : Sub Saharan Perspective (Simon Fulgsang 2013)	Dependen: Ketimpangan pendapatan Independen: Inflasi, Pertumbuhan penduduk perkotaan, hyperinflasi, investasi, industrialisasi , pertumbuhan populasi	Analisis Regresi Data Panel (Random Effect)	Inflasi, Pertumbuhan penduduk perkotaan berpengaruh negative terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan, hyperinflasi, investasi, industrialisasi dan pertumbuhan populasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan
8.	Effect of Income Inequality on The Economic Growth of Brazilian states (An analysis using the cointegrated panel model) (Cássio Nobrega Besarria, Jevuks Matheus Araujo, Andrea Ferreira da Silva, Erika Fernanda Miranda Sobral and Thiago Geovane Pereira 2018)	Dependen : Pertumbuhan ekonomi Independen : Koefisien Gini, PDB Per Kapita, Tingkat Pendidikan, Investasi, Ketidakstabilan politik, Korupsi, Energi	Uji Kointegrasi Data Panel	Ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pembangunan, dan signifikan dalam efek jangka panjang.
9.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali	Dependen: Ketimpangan Pendapatan Independent: PAD, DAU, Belanja Modal	Analisis Regresi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan Signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh

	(Putri & Natha 2015)			positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, Belanja Modal berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
10	Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016 (Rayiidatul Fauza 2019)	Dependen: ketimpangan pendapatan Independen: IPM, PDRB, PAD, DAU	Analisis Regrsi Data Panel	Variabel IPM, PDRB, PAD dan DAU secara keseluruhan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
11	Pengaruh Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat (Muhammad Robby 2018)	Dependen : ketimpangan pendapatan Independen : investasi dan ipm	Analisis Regresi Data Panel	Variabel investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, variabel ipm berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
12	A panel vector AutoRegression analysis of income inequality dynamics in each of the 50 states of USA (Olugbenga Onafowora, Oluwole Owoye 2017)	Dependen : Ketimpangan Pendapatan Independen : Pendapatan Per Kapita Kebebasan Ekonomi Tingkat Pendidikan Pengangguran Rasio Ketergantungan	Metode Panel dengan PVAR (<i>Panel Vector Autoregression</i>)	Variabel pendapatan per kapita berpengaruh positif signifikan, variabel pengangguran dan rasio ketergantungan memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang, kebebasan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan. Sedangkan variabel

				pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan
13	The Relationship Between Economic Growth and Income Distribution In Turkey and The Turkish Republics of Central Asia and Caucasia: Dynamic Panel Data Analysis With Structural Breaks (Mehmet Mercan and Ozlem Arzu Azer 2013)	Dependen : Ketimpangan pendapatan Independen : Pertumbuhan Ekonomi (GDP)	Data Panel (Uji Kointegrasi)	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (indeks gini)
14	Judul Penelitian : Inequality and Economic Growth in China (W. Adrian Risso & Edgar J Sanchez Carrera 2012)	Pertumbuhan ekonomi (PDB) Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	Kausalitas Granger (Uji Kointegrasi)	Hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dan berpengaruh signifikan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan baik sebelum reformasi ataupun sesudah. Dimana Pra periode (1952-1978) tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,33% dan rata-rata indeks gini sebesar 0,27 maka menunjukkan ketimpangan rendah. Pasca periode (1979-2007) tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar

				7,07% dengan indeks gini sebesar 0,33.
15	Judul Penelitian: Fiscal Decentralization, Commitment, and Regional Inequality: Evidence From State-Level Cross-Sectional Data for the United States (Akai dan Saka 2005)	dependen: Ketimpangan Pendapatan Independen: PDRB per kapita, pendidikan, politik, tingkat pengangguran Populasi penduduk,	Regresi Linier Berganda	Variabel populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan, variabel PDRB per kapita, pendidikan, politik, tingkat pengangguran berpengaruh dan signifikan,

2.3.1 Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

1. Arif & Wicaksoni (2017) melakukan penelitian tentang ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variable dependennya adalah ketimpangan pendapatan dan variabel independen IPM, pertumbuhan ekonomi serta jumlah penduduk, serta sama menggunakan penelitian regresi data padel. Yang membedakan penelitian adalah tempat penelitian serta kurun waktu yang digunakan dalam penelitian.
2. Pangkirno, Rotinsulu & Wuaran (2016) yang melakukan penelitian tentang Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara. Persamaan dalam

penelitian ini sama menggunakan analisis data panel serta variabel dependennya ketimpangan pendapatan serta variabel independennya adalah pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan.

3. Zlatko Nikoloski (2009) melakukan penelitian tentang *Economic and Political Determinants of Income Inequality*. Dalam penelitian ini persamaanya menggunakan GDP per capita. Sementara perbedaanya adalah penelitian ini menggunakan analisis analisis data GMM (Generalized mothod of moment).
4. Hindun, Soejoto & Haryanto (2019) yang melakukan penelitian tentang *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*. Persamaan dalam penelitian ini sama sama menggunakan analisis regresi data panel serta variabel dependennya menggunakan ketimpangan pendapatan dan independennya menggunakan kemiskinan, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel independen pendidikan dan pengangguran.
5. Anshari, Azhar & Airusni (2018) yang melakukan penelitian tentang *Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi di Indonesia*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama menggunakan analisis regresi data panel serta variabel dependennya menggunakan ketimpangan pendapatan dan variabel independennya menggunakan belanja modal. Sementara perbedaan dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel pendidikan dan UMP.

6. Sholihah (2013) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal dan Tingkat Pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Persamaan dalam penelitian ini sama sama menggunakan analisis regresi data panel serta variabel dependennya ketimpangan pendapatan dan variabel independennya pertumbuhan ekonomi, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah tidak menggunakan variabel pendidikan dan investasi.
7. Simon Fulgsang (2013) melakukan penelitian tentang Determinants of Income Inequality: Sub Saharan Perspective. Persamaan penelitian ini adalah sama sama menggunakan variabel dependen ketimpangan pendapatan serta variabel independen jumlah penduduk, sementara perbedaan penelitian ini adalah variabel independen inflasi, investasi serta kurun waktu yang berbeda.
8. Besarria, dkk (2018) yang melakukan tentang penelitian Effect of Income Inequality on The Economic Growth of Brazilian states (An analysis using the cointegrated panel model) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh yaitu variabel independen menggunakan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu metode analisis menggunakan data panel dengan Uji Kointegrasi sedangkan pada penelitian ini hanya dengan analisis regresi data panel dengan metode *fixed effect model*.
9. Putri, dkk (2015) yang melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umu dan belanja modal terhadap

ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variable dependen ketimpangan pendapatan serta variable independen dana alokasi umum, sedangkan perbedaan dari penelitian ini menggunakan variable independen pendapatan asli daerah dan belanja modal, serta Analisis regresi linier berganda, serta kurun waktu penelitian yang digunakan berbeda.

10. Robby (2018) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat. Persamaanya yaitu variabel dependen menggunakan ketimpangan pendapatan (indeks gini). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan Robby (2018) yaitu variabel independen menggunakan investasi.
11. Mercan dan Ozlem (2013) yang melakukan penelitian tentang The Relationship Between Economic Growth and Income Distribution In Turkey and The Turkish Republics of Central Asia and Caucasia: Dynamic Panel Data Analysis With Structural Breaks yaitu variabel dependen menggunakan indeks gini dan variabel independen menggunakan pertumbuhan ekonomi (PDB/ GDP). Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu Mercan dan Ozlem (2013) menggunakan Uji Kointegrasi.
12. Onafowora dan Owoye (2017) yang melakukan penelitian tentang A panel vector AutoRegression analysis of income inequality dynamics in each of the 50 states of USA. Persamaan dari penelitian ini yaitu variabel

dependen menggunakan ketimpangan pendapatan (indeks gini). Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu metode analisis pada Onafowora dan Owoye (2017) menggunakan menggunakan *Panel Vector Autoregression* (PVAR) sedangkan pada penelitian ini hanya dengan analisis regresi data panel dengan metode *fixed effect model*.

13. Fauza (2019) yang melakukan penelitian tentang Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016. Persamaan dari penelitian ini yaitu variable dependen menggunakan ketimpangan pendapatan serta variable independen menggunakan PDRB, IPM dan DAU dan analisis regresi data panel, sementara perpindahan dari penelitian ini menggunakan PAD dan kurun waktu penelitian yang berbeda.
14. Risso dan Carrera (2012) yang melakukan penelitian tentang Inequality and Economic Growth in China sedangkan persamaanya yaitu variabel dependen menggunakan ketimpangan pendapatan (indeks gini). Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu metode analisis pada Risso dan Carrera (2012) menggunakan *Kausalitas Granger* (Uji Kointegrasi) sedangkan pada penelitian ini hanya dengan analisis regresi data panel dengan metode *fixed effect model*.
15. Akai dan Sakata (2005) yang melakukan penelitian tentang Fiscal Decentralization, Commitment, and Regional Inequality: Evidence From State-Level Cross-Sectional Data for the United States persamaan dari penelitian ini adalah variable dependeny sama-sama menggunakan indek gini dan variable independeny menggunakan PDRB per kapita, jumlah

penduduk sedangkan perbedaan dari penelitian adalah ini adalah tidak menggunakan variable independent pendidikan, dan politik

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran arah penelitian, dan dibuat guna memudahkan penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagaiberikut:

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Namun pertumbuhan bukan satu-satunya indikator acuan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nasional pada kenyataannya tidak merata di seluruh provinsi, khususnya di pulau Papua dan Maluku. PDRB per kapita yang dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat belum terdistribusi secara merata. Tidak meratanya distribusi pendapatan inilah yang menyebabkan munculnya ketimpangan distribusi pendapatan, khususnya di provinsi Papua.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan telah disampaikan oleh para ekonom dan telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Beberapa hasil menunjukkan terdapat beberapa faktor berpengaruh positif dan signifikan, namun terdapat pula hasil yang berpengaruh negatif dan signifikan di daerah lain.

Penelitian ini peneliti akan menggunakan empat variabel bebas yang akan diujikan pengaruhnya terhadap satu variabel terikat yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Pemilihan variabel bebas tersebut didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, yang dijadikan acuan penelitian oleh peneliti. Variabel bebas tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, IPM, DAU dan belanja modal.

Pertumbuhan PDRB per kapita dipilih karena perbedaan pertumbuhan PDRB perkapita sangat besar antar Provinsi di Indonesia sendiri, dimana provinsi Papua salah satu laju pertumbuhan pendapatannya paling tinggi justru menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Menurut Kuznets pada awal tahap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan cenderung membaik. PDRB per kapita yang menunjukkan distribusi pendapatan diketahui berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada awal pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan dipilih karena pada tahun 2018 Provinsi Papua termasuk salah satu daerah yang kemiskinannya menurun sehingga diharapkan dapat mempengaruhi distribusi pendapatan.

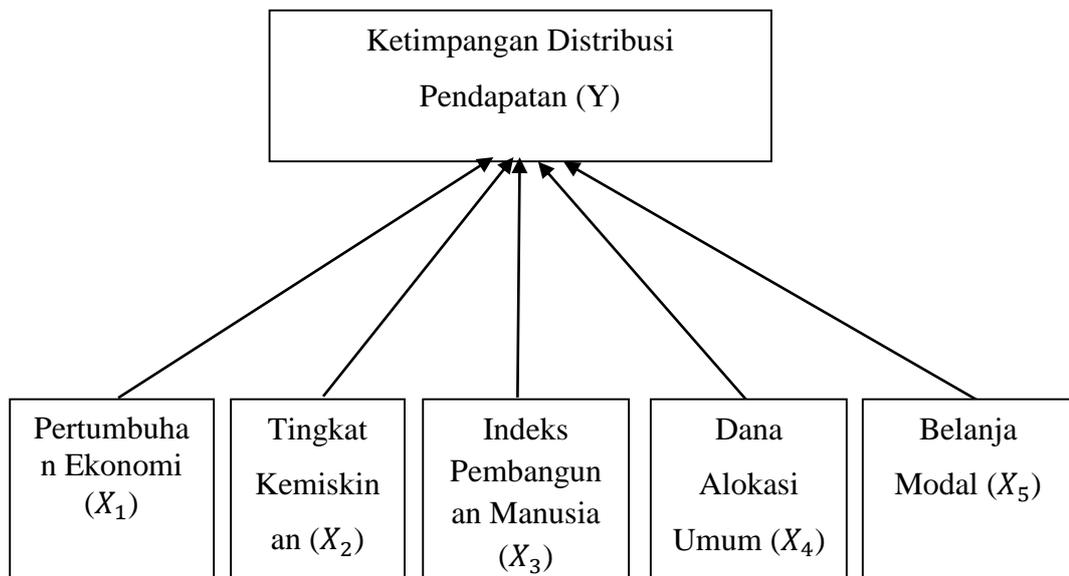
Dana Alokasi Umum (DAU) di pilih karena di provinsi Papua anggaran DAU yang di berikan dri pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dengan adanya alokasi dana yang baik maka akan menciptakan keseimbangan serta keselarasan bagi masyarakat yang ada pada daerah, hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah meningkan dengan adanya pembangunan dari pemanfaatan DAU, DAU dapat mengurangi ketimpangan pendapatan jika dengan asumsi DAU lebih dipergunakan untuk belanja pembangunan daripada untuk belanja rutin.

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah guna untuk pemeratakan pembangunan. Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan

aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang digunakan untuk merepresentasikan kualitas sumber daya manusia. Komponen dari IPM sendiri adalah angka harapan hidup saat kelahiran, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan paritas daya beli. Sementara di provinsi Papua sendiri masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang baik. Sehingga, akan dianalisis apakah peningkatan kualitas penduduk dapat mengurangi ketimpangan ataukah sebaliknya. Tingkat IPM yang rendah maka akan pengaruh terhadap kesenjangan masyarakat yang tinggi pula. Hal ini sejalan dengan penelitian T & Purbadharmaja (2017), yang dimana IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas, gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini terlihat dalam bagan berikut:



2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan penelitian yang relevan, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua pada tahun 2013-2018.
2. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua pada tahun 2013-2018.
3. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua pada tahun 2013-2018.
4. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari dana alokasi umum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua pada tahun 2013-2018.
5. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua pada tahun 2013-2018.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua, hal ini menunjukkan bahwa jika ada kenaikan nilai pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua.
2. Variabel tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada kenaikan tingkat kemiskinan maka akan menaikkan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua.
3. Variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua.
4. Variabel dana alokasi umum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada kenaikan dana alokasi umum maka akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua.
5. Variabel belanja modal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa ada kenaikan anggaran belanja modal maka akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua.

5.2 Saran

1. Pemerintah Provinsi Papua dan pusat diharapkan dapat lebih meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, secara komprehensif atau luas dan lengkap, serta dapat mengembangkan sektor pertanian, pertambangan, dan industri yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Sehingga dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat.
2. Untuk meningkatkan perekonomiannya masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua harus meningkatkan pemerataan pembangunan yang lebih merata sehingga akan berpengaruh pada kenaikan ekonomi dan akan mengurangi kemiskinan.
3. Provinsi Papua memang menjadi salah satu dengan kenaikan IPM tertinggi di Indonesia, namun naiknya IPM tersebut disebabkan karena tingginya masyarakat pendatang, sementara masyarakat asli belum adanya peningkatan IPM yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah lebih meningkatkan mutu pendidikan di setiap kabupaten/ kota di Provinsi Papua seperti pada sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai, aspek kurikulum, peserta didik, lingkungan sekolah, pembiayaan, kelembagaan, serta peran masyarakat, kemudian tidak kalah pentingnya yaitu tenaga pengajar yang berkualitas.
4. Wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Papua menjadi salah satu daerah yang menerima dana alokasi umum tertinggi di Indonesia, di harapkan dalam hal pembangunan, pemerintah Papua dapat melakukan pemaksimalan dana

alokasi umum yang digunakan dalam hal belanja pembangunan daripada untuk belanja pemerintah, sehingga diharapkan akan meningkatkan perekonomian di Provinsi Papua.

5. Pemerintah Provinsi Papua diharapkan dapat mengalokasi anggaran belanja modal dalam pembangunan yang lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Acmad, Kuncoro. (2001). *Cara menggunakan dan memaknai analisis Asumsi Klasik, cetakan pertama*. Bandung: ALFABETA
- Abe, A. (1994). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, B. P. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Beanja Modal di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Dan DIY. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 101-118.
- Akai, Nobuo., & Sakata, M. (2005). Fiscal Decentralization, Commitment, and Regional Inequality: Evidence From State-Level Cross-Sectional Data for the United States. *The Journal Economic review*. Faculty of Economic University of Tokyo
<http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/03research02dp.html>
- Alexander, A. (1994). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Anshari, M., Azhar Z., & Ariusni. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi di Indonesia. *EcoGen*, Vol 01 No 03.
- Andiny, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Ketimpangan di Provinsi Aceh . *Jurnal Penelitian Akuntansi*, Vol 01 No 02.
- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya. *Urecol*, 323–328
- Ardra, B. (2019) Indikator Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Indeks Gini, Pengertian Rasio Gini Rumus Indeks Gini.
- Arsyad, L. (1997). *Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat*. Yogyakarta: STIE YKPN

- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Arsyad, L. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Aryanto, R. (2011). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatra Seatan. *Jurnal Ilmiah*. Vol 3 No 2.
- Azer, O. & Mercan, M. (2013). The Relationship Between Economic Growth and Income Distribution In Turkey and The Turkish Republics of Central Asia and Caucasia: Dynamic Panel Data Analysis With Structural Breaks. *Journal Eurasian Economic*, Vol 03 No 02.
- Badan Pusat Statistik. “*Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018*” Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
- Badan Pusat Statistik. “*PDRB Atas Harga Konstan (Dengan Tambang) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018*” Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
- Badan Pusat Statistik. “*Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018*” Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
- Badan Pusat Statistik. “*Tingkat Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018*” Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
- Badan Pusat Statistik. “*Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2013-2018*” Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
- Badan Pusat Statistik. “*Gini Ratio Provinsi di Indonesia tahun 2013-2018*” Badan Pusat Statistik Indonesia
- Badan Pusat Statistik. “*Laju Pertumbuhan PDRB per Pulau di Indonesia tahun 2013-2018*” Badan Pusat Statistik Indonesia
- Badan Pusat Statistik. “*Distribusi PDB per Pulau di Indonesia tahun 2013-2018*” Badan Pusat Statistik Indonesia
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Barro, Robert J. (1999) Inequality, Growth and Investment, National Bureau Of Economi Research, *Working Paper No 73*

<http://www.nbr.org/paper/w708>

- Bessarri, N., Araujo, J., & Pereira, T. (2018). Effect of Income Inequality on The Economic Growth of Brazilian states: An analysis using the cointegrated panel model. *International Journal of Social Economics*, Vol 45 No 03
- Boediono. (2005). *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. “*Real APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 2013-2018*” Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Indonesia
- Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Dumairy. (2004). *Perekonoian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Fattah, Sanusi, & Irman. (2012). Anaisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah Di Provinsi Suawesi Selatan Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal*, 23-30.
- Fugsang, S. (2013). *Determinants of Income Inequality : Sub Saharan Perspective*. Thesis. Aarhus University.
<http://www.africa.undp.org/library/reports/Determinants-of-IncomeInequality:Sub-Saharan-Perspective.html>
- Fauza, R. (2019). Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 21 No 03.
- Gujarati Damodar, 2003, *Ekonoetrika Dasar*. Jakarta Erlangga.
- Ghozali, C. (2002). *Statistik Non Parametrik : Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hassan, S. A., Zaman, K., & Gul, S. (2015). The Relationship between Growth-Inequality Poverly Triangle ang Environmental Degradation: *Arab Economic ang Business Journal*, Vol 10, 57-71
- Hartini , N. T. (2017). Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-2015, 2017, 2017. *Junal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol 6

- Harahap, Y. (2006). *Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Kaitanya dengan Kemiskinan di Perkotaan*. Lapran Penelitian Hukum Lingkungan Mahasiswa. Tesis Universitas Sumatra Utara
- Henny, A.K., Pangkirno (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal otonomi Pembangunan*. Vol 16 No.01
- Hindun.,Soejoto, A.,& Hariyati. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal EkonoidanKewirausahaan*, Vol 08 No 03
- Hutabarat, D. E. (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Stido Profesional*, Vol 4.
- Kuncoro, M. (2001). *Metode Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Kuncoro, M. (2012). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nikoloski, Z. (2009). *Economic and Political Determinants of Income Inequality*. Master's thesis. University of College
http://www.stat.unipg.it/assec2009/Documents/papers/87_Nikoloski.pdf
- Nugroho, H. (1995). *Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kesenjangan*. Yogyakarta:Aditya Media
- Putri, N. & Natha I. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 04 No 01.
- Robby, M. (2018). Pengaruh Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah di Kalimantan Barat. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, Vol 7 No2.
- Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. UPP . AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.

- Sadono, S. (2006). *Makroekonomi: Teori Pengantar (edisi Ketiga)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Setiawan, Abdul O. (2016). Analisis Perubahan Struktural Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Simon, K. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, XLV March.
- Soediyono. (1992). *Teori Ekonomi Mikro: Penantar Analisis Pendapatan Nasional Yogya*. Yogyakarta: Liberti
- Sukirno, S. (2004). *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syarifah, Leni K. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah Terhadap Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. *Skripsi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syawie, M. (2011). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial. *Jurnal Informasi*, Vol 16. No 02, 213-219
- Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori Dan Temuan Empiris*. Jakarta.
- Tarigan, R. (2004). *Ekonomi Regional: Toeri dan Aplikasi*. Jakarta: terjemah Bumi Aksara.
- Todaro, M. (2006). *Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- UNDP. (1995). *Human Development Report*. United Nations Development Program. New York.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.